



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Pertanian RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 14 Februari 2022
Waktu : pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara I (KK-IV) Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : 1. Sudin, S. E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
2. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
- Acara : Membahas:
1. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022; dan
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.
3. Dan lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9 dari 11 orang Anggota
1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3) H. Sunarna, S.E., M.Hum (Virtual)
4) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
5) Drs. I Made Urip, M.Si. (Virtual)
6) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A. (Virtual)
7) Vira Ervina, S.E., M.B.A. (Virtual)
8) Maria Lestari, S.Pd.
9) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. (Virtual)
2. Fraksi Partai Golongan Karya
7 dari 8 orang Anggota
1) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.

- 2) Firman Soebayo, S.E., M.H. (Virtual)
 - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. (Virtual)
 - 4) Ir. Panggah Susanto, M.M. (Virtual)
 - 5) Budhy Setiawan (Virtual)
 - 6) Alien Mus
 - 7) Teti Rohatiningsih, S.Sos.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV
 - 2) Ir. H. T. A. Khalid, M.M. (Virtual)
 - 3) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 5) Ir. Dwita Ria Gunadi
 - 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si. (Virtual)
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
5 dari 6 orang Anggota
- 1) Rusdi Masse Mappasessu/Wakil Ketua Komisi IV
 - 2) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 3) Ir. Abdullah Tuasikal
 - 4) Yessy Melania, S.E. (Virtual)
 - 5) Ir. Hj. Sri Kustina (Virtual)
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
6 dari 6 orang Anggota
- 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV
 - 2) H. Muhtarom, S.Sos. (Virtual)
 - 3) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
 - 4) Daniel Johan, S.E. (Virtual)
 - 5) Drs. H. Ibnu Multazam
 - 6) Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat
4 dari 5 orang Anggota
- 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 3) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si. (Virtual)
 - 4) Muslim, S.HI, M.M.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
- 1) drh. H. Slamet
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 - 3) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 - 4) H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 orang Anggota
 - 1) H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
 - 2) Haerudin, S.Ag., M.H.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota
 - 1) Ema Umiyyatul Chusnah

B. Pemerintah

1. Menteri Pertanian RI;
2. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
4. Eselon I Kementerian Pertanian RI.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

...yang hadir pada pagi ini semua dalam keadaan sehat *wal 'afiat*.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV.
Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajaran.
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, serta
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat *wal 'afiat*.

Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 6 Desember 2021 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 12 Januari 2022, pada hari Senin, tanggal 14 Februari Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas:

1. *Automatic adjustment* belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;
2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022;
3. Dan lain-lainnya.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.30 WIB. Lebih cepat lebih baik karena atas saran Pimpinan DPR RI, rapatnya jangan terlalu lama. Jadi kalau bertanya sesuai dengan Tatib cukup tiga menit dan kalau sudah ada teman kita atau fraksi lain yang sudah bertanya, mohon jangan ditanyakan lagi biar nanti dijawab sekaligus, dan diakhiri pada pukul 14.30 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama.

Sebagai susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Pertanian terhadap agenda hari ini;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Apakah acara rapat dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kita hormati.

Kita ketahui bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan selain sebagai pemasok bahan pangan dan bahan baku industri, sektor pertanian juga sebagai salah satu sumber pendapatan nasional atau salah satu penghasil devisa negara. Di sisi lain sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya sumber daya alam, perubahan iklim global hingga proporsi kehilangan hasil panen yang masih cukup tinggi. Meski demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan pada masa krisis tahun 1998 dan 2008.

Kita boleh berbangga dengan capaian-capaian tersebut. Namun, hendaknya capaian ini memberikan pemicu pada kita untuk lebih cermat bekerja supaya prestasi masih bisa dicapai. Kita semua tahu bahwa nilai ekspor komoditas pertanian selama tiga tahun terakhir ini cukup membanggakan tapi kita harus siap untuk melihat ke depan bahwa penyumbang angka ekspor terbesar porsinya adalah CPO, karena mahalnya harga CPO di luar negeri sampai-sampai minyak goreng di dalam negeri kekurangan yang cukup dahsyat. Nanti kita bahas ini tupoksinya siapa. Bagaimana dengan komoditas lainnya, untuk itu Kementerian Pertanian dalam menyusun program kerja harus secara cermat dan antisipatif terhadap tantangan tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

Mencermati rancangan program kegiatan anggaran yang tertuang pada bahan Raker Komisi IV mempertanyakan Kementerian Pertanian apakah pelaksanaan pembangunan pertanian dapat dengan berjalan dengan

baik, proporsionalnya yang seperti ini. Kita lihat anggaran untuk riset sebesar Rp315.098.000.000, serta anggaran peningkatan nilai tambah dan daya saing industri sebesar 1,67 triliun. Sangat sedikit dibandingkan dengan anggaran untuk dukungan manajemen yang sangat tinggi 4,93 triliun. Mencermati kembali rancangan tersebut maka anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2022 ini sebagian kecil diberikan kepada petani. Porsi yang besar-besar justru dimanfaatkan oleh pegawai kementerian baik di pusat maupun di daerah. Padahal, pada dua rapat yang lalu sebelumnya Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi, menyusun ulang rencana ulang program kegiatan Tahun Anggaran 2022 dengan lebih cermat dan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani. Kegiatan non prioritas harus diubah menjadi kegiatan prioritas yang lebih efektif bermanfaat bagi petani.

Komisi IV meminta agar proporsi anggaran untuk kelima program utama Kementerian Pertanian diubah sehingga benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pertanian juga harus mampu melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat berpengaruh pada hasil atau produksi pertanian, serta melakukan mitigasi potensi krisis pangan terhadap terutama di tengah pandemik Covid-19. Hal-hal tersebut haruslah menjadi dasar dalam penyusunan program kerja dan anggaran Kementerian Pertanian. Hindari kebijakan dengan pendekatan yang bersifat *one side risk all* mengingat tantangan yang berbeda dan kompleks di setiap wilayah.

Pada rapat kerja hari ini Komisi IV meminta penjelasan secara mendetail rencana *automatic adjustment* sebagaimana yang diusulkan pada dua rapat sebelumnya, yaitu terutama mengenai anggaran Badan Ketahanan Pangan, khususnya anggaran Pekarangan Lestari (P2L), beberapa hal lain membutuhkan penjelasan di antaranya sejauh mana tindak lanjut dan penanganan kasus ASF di Kalimantan Barat dan di berbagai wilayah lainnya. Supaya Kementerian Pertanian dalam pengendalian hama seperti serangan hama belalang di Pulau Sumba dan hama tikus di beberapa kabupaten di Jawa Tengah terkait pelaksanaan bantuan yang bermasalah. Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan kepada petani peternak agar permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Bantuan yang disalurkan haruslah sehat, berkualitas, bermutu sesuai kriteria teknis dan sesuai dengan kebutuhan petani peternak.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Sebelum saya mengakhiri pengantar saya, kemarin staf apa sudah menerima yang di paraf? Sudah atau belum? Sekjen sudah apa belum? Jangan sampai nanti dalam perjalanan rapat kerja ini ada yang menyinggung-menyinggung masalah tersebut.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Sudah di paraf Pak, segera dibagikan belum dibagikan. Belum Pak belum.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya segera dibagikan supaya seluruh Anggota tahu apa yang bisa dimintakan oleh rakyat atau petaninya dapat terpenuhi karena Anggota Komisi IV ini banyak hutang janji sama petani dan rakyat. Tahu-tahu sudah janji, nanti tahu-tahu cuma janji tinggal janji. Istilah lain janji Caleg katanya kan begitu kan. Saya tidak mau terjadi Anggota kita seperti itu.

Demikian pegantar kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal rapat hari ini. Silakan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Salam sehat untuk kita semua.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat kami hormati. Para pejabat Kementan dan hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati.

Hamdan wa syukron lillah, wala haula wala quwwata illa billah.

Robbisrohli sodri wa yassirli amri wah lul uqdatan min lisani yafqohu qouli

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara rapat kerja dalam keadaan sehat *wal 'afiat*.

Perkenalkan kami dari jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI atas undangan rapat kerja hari ini sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat atau RDP tanggal 2 Februari 2022 untuk membahas yang pertama *Automatic adjustment* belanja Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, yang kedua, Rencana Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, dan yang ketiga lain-lain.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati

Izinkan pada kesempatan pembuka ini saya mengantarkan penyampaian perubahan *automatic adjustment* Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 tentang *Automatic adjustment* belanja Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2022 di mana dari Pagu

Anggaran Tahun 2022 sebesar 14,45 triliun Kementerian Pertanian diminta melakukan *automatic adjustment* sebesar 680,49 miliar rupiah yang berasal dari pagu rupiah murni 10 akun Belanja Barang atau BB, yaitu honor, perjalanan, paket *meeting*, belanja barang, operasional lainnya dan belanja non-barang operasional lainnya.

Sesuai dengan hasil pembahasan Raker dan RDP sebelumnya kemudian memasukkan pembukaan blokir kegiatan Badan Ketahanan Pangan atau BKP sebesar 147,3 miliar maka rincian penyesuaian akhir per Eselon I adalah sebagai berikut:

Yang pertama, Sekretaris Jenderal 175,12 miliar rupiah;
Yang kedua, Dirjen Tanaman Pangan 45,59 miliar rupiah;
Yang ketiga, Dirjen Hortikultura 18,23 miliar rupiah; dan
Keempat, Dirjen Perkebunan 26,77 miliar rupiah;
Yang kelima, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 41,10 miliar rupiah;
dan
Keenam, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian 59, ... 9 miliar rupiah;
Yang ketujuh, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 8,60 miliar rupiah;
Yang kedelapan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 33,48 miliar rupiah;
Yang kesembilan, Badan Ketahanan Pangan 262,30 miliar rupiah; dan
Yang kesepuluh, Badan Karantina Pertanian sebesar 9,81 miliar rupiah.

Khusus untuk anggaran pada Inspektorat Jenderal tidak dilakukan penyesuaian *automatic adjustment*. Terkait dengan perubahan *automatic adjustment* tersebut di atas mohon kiranya Pimpinan Komisi IV DPR RI untuk dapat menyetujui sebagai dasar pengajuan revisi anggaran ke Kementerian Keuangan.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda kedua, kami menyampaikan Rancangan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2022. Landasan yang digunakan Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2022 adalah Rencana Kerja Pemerintah atau RKP dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Dalam rangka penjabaran RKP pada tahun 2022 Kementerian Pertanian mengacu pada lima program sebagai kelanjutan pembangunan pertanian tahun sebelumnya, yaitu meliputi:

Pertama Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
Yang kedua, program nilai tambah dan daya saing industri;
Yang ketiga, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
Keempat, program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
Kelima, program dukungan manajemen.

Dengan berpatokan pada lima program tersebut dan memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang ada serta mempertimbangkan Kementerian Pertanian tetap harus menjalankan tugas utama menyediakan pangan bagi

seluruh penduduk di saat pandemik masih berlangsung, target produksi beberapa komoditas pangan utama yaitu produksi padi ditetapkan 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,20 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, serta komoditas strategis lainnya telah disesuaikan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran yang ada.

Dalam melaksanakan program kegiatan tahun 2022 strategi yang digunakan oleh Kementerian Pertanian adalah fokus pada penyediaan pangan utama bagi penduduk Indonesia dan diikuti upaya meningkatkan daya saing produksi pertanian agar dapat mengisi pasar ekspor yang ditempuh melalui dua strategi kegiatan, yaitu: yang pertama kegiatan utama dilaksanakan oleh Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Perternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dirjen Perkebunan.

Yang meliputi kegiatan utama di Dirjen Tanaman Pangan misalnya:

- a. Meningkatkan produksi padi, jagung, kedelai serta pangan lokal termasuk mendukung Food Estate 2022;
- b. Penguatan manajemen penyediaan benih;
- c. Pengamanan produksi melalui pengendalian OPT dan penanganan kekeringan dan banjir; dan yang 4
- d. Hilirisasi pengolahan dan pengawetan ekspor.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH, dan Dirjen Perkebunan sehingga pangan utama penduduk tahun 2022 benar-benar kita bisa jaga secara bersama.

Yang kedua kegiatan pendukung. Strategi mendukung kegiatan utama Kementerian Pertanian tahun 2022, di antaranya meliputi:

- a. Penelitian sarana prasarana dan pembiayaan pertanian;
- b. Pengembangan diversifikasi pangan;
- c. Penguatan riset dan inovasi teknologi pertanian, dan
- d. Peningkatan SDM Pertanian;
- e. Peningkatan peran perkarantina; dan
- f. Penguatan manajemen dan pengawasan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan pertanian Tahun Anggaran 2022 dan memperhatikan kesimpulan hasil rapat kerja dan RDP sebelumnya, telah dilakukan realokasi anggaran Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang bersumber dari kegiatan Food Estate Kalimantan Tengah sebesar 140 miliar.

Selanjutnya hasil realokasi anggaran digunakan untuk kepentingan internal Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar 120 miliar mendukung JIT, CUT, dan Alsintan TR2, TR4, pompa air, *cultivator* dan *hand sprayer*. Sisa realokasi sebesar 20 miliar didistribusikan Ke Dirjen Tanaman Pangan untuk pengadaan *combine harvester*. Selain itu dengan dibukanya blokir anggaran Badan Ketahanan Pangan sebesar 147,3 miliar, maka kegiatan P2L sebanyak 1.650 unit dapat segera dilaksanakan. Demikian pula kegiatan lain seperti Bimtek, Pasar Mitra Tani atau Toko Tani Indonesia atau

TTIC serta beberapa program lainnya yang berkait dengan monitoring stok dan stabilisasi harga pangan.

Hal ini sangat penting mengingat kesiapan stok pangan dan stabilisasi harga perlu dipantau menghadapi musim panen dan Hari Raya Idul Fitri. Dengan adanya realokasi anggaran tersebut komposisi anggaran Dirjen Prasarana dan Prasarana Pertanian berkurang menjadi 2,98 Triliun Rupiah, sedangkan Dirjen Anggaran Dirjen Tanaman Pangan bertambah menjadi 2,21 Triliun Rupiah. Komposisi anggaran pada Eselon I lainnya tidak mengalami perubahan sebagaimana disampaikan pada bahan rapat kerja hari ini. Terkait dengan perubahan komposisi anggaran per Eselon I akibat adanya realokasi anggaran, mohon kiranya Pimpinan Komisi IV DPR RI untuk dapat menyetujui pagu anggaran akhir anggaran per Eselon I untuk dijadikan dasar bagi kami mengajukan revisi anggaran kementerian ke Kementerian Keuangan.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati.

Pada bagian lain mohon izin untuk menyampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti RDP pada tanggal 2 Februari 2022 seperti tercantum pada kesimpulan RDP butir ketiga, perlu kami laporkan pada pula bahwa sampai saat ini Kementerian Pertanian berupaya menindaklanjuti temuan BPK. Perkembangan usul tindak lanjut atau OTL rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI berdasarkan tahun pemeriksaan pada Kementerian Pertanian sebanyak 1.646 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebesar 1.533 rekomendasi atau 93,13% dengan rincian...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri saya mau tanyakan. Ini enggak ada nilainya? Hanya temuannya?

MENTERI PERTANIAN RI:

Nilainya ada Bapak, jumlah jumlahnya ..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nanti tolong ditampilkan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya mau tahu juga. Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI:

Boleh lanjut? Kami lanjutkan.

Dengan rincian rekomendasi yang dinyatakan selesai sebanyak 1.266 rekomendasi atau 76,90% dan yang kedua rekomendasi yang belum sesuai sebanyak 267 rekomendasi atau 16,22%. Sisanya sebanyak 64 rekomendasi belum ditindaklanjuti Kementerian Pertanian dan 40 rekomendasi dinyatakan oleh BPK RI tidak dapat ditindaklanjuti. Kami akan terus mengawal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan mendorong pelaksanaan program dan kegiatan lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang ada.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan rapat kerja ini. Mohon izin kepada Pimpinan Komisi IV DPR RI, apabila diperlukan pada saatnya kepada masing-masing Eselon I untuk dapat menyampaikan tambahan penjelasan dan seperti itulah kami berharap.

Terima kasih atas segala perhatian Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR di dalam mempersiapkan segala sesuatunya bagi rencana program Kementerian Pertanian.

Kami ucapkan terima kasih. Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih atas penjelasannya.

Nanti segera juga kita bahas permasalahan e-RDCK serta pupuk. Kemarin kami Komisi IV sudah salah satunya merekomendasikan ya mengenai peng-*collect*-kan data e-RDCK. Pengawasan serta juga siapa yang menjadi tanggung jawab lini 1, 2, 3, 4 sampai ke pemasok karena dalam beberapa hal ini saya juga mendapat masukan yang cukup banyak dari berbagai pihak, pihak manapun baik di luar maupun dari kementerian/lembaga yang bukan mitra kita.

Selanjutnya Ibu Anggi silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik, terima kasih Ketua.

Pak Menteri dan Bapak Ibu Anggota yang kami hormati.

Kita sebelum para Anggota untuk memberikan tanggapannya, Pak Menteri dan Pak Bakir mungkin tentang pupuk menyambung dari Pak Ketua, jadi kami menerima keluhan dari Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat. Dalam rekomendasi kita salah satunya memang tebu menjadi komoditas yang disubsidi tetapi jenis ya Pak Ali Jamil, tetapi jenis kita sepakati kemarin adalah urea dan NPK. Nah, ini

menyambungnya seperti apa ini nanti, skemanya seperti apa? Karena memang ZA ini sangat dibutuhkan oleh para petani tebu dan bahkan mereka akan jika memang dicabut mereka akan mengeluarkan biaya jauh lebih besar 15% perkiraannya. Ini perlu, perlu direspons Pak Ali Jamil dan Bapak/Ibu sekalian karena ini apa seruan atau permintaan dari teman-teman petani tebu.

Baik selanjutnya Pak, saya persilakan Pak Abdullah Tuasikal untuk bisa memberikan tanggapannya. Silakan.

Selamat datang kembali Pak Hendro. Selamat datang kembali.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen beserta Eselon I

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Hari ini saya mewakili Partai Nasdem, Fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pikiran-pikiran pendapat di dalam rapat kerja hari ini. Saya kira hari ini kita laksanakan rapat kerja tapi sebelumnya kita sudah melaksanakan RDP dua kali, rapat kerja satu kali. Dalam kegiatan-kegiatan ini banyak materi yang kita sudah bahas dan hari ini saya yakin kita pasti telah ulang-ulang kembali. Padahal, kita tahu bahwa virus semakin seram dan kalau dapat di ruang ini kita tidak terlalu berlama-lama karena apa yang saya katakan tadi bahwa sudah ada dua RDP dan sudah ada satu Raker Bapak/Ibu.

Dua, kami harapkan agar dengan represi itu Ketua maupun Pimpinan juga agar kita segera ketuk palu agar kegiatan-kegiatan kita, kegiatan kementerian juga bisa berjalan, itu harapan dari kami.

Melalui rapat kerja dengan Menteri Pertanian RI hari ini, kami Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa masukan dan pandangan sebagai berikut. Kami Fraksi Partai Nasdem menyoroti berbagai persoalan yang sedang menjadi perhatian publik saat ini yang berhubungan dengan tugas Kementerian RI seperti kelangkaan minyak goreng dan pupuk subsidi, juga impor jagung, kedelai, daging, dan gula yang cukup mengkhawatirkan. Kami meminta Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah cepat untuk mengatasi masalah ini dengan berkoordinasi intensif dengan kementerian atau lembaga terkait. Kementerian harus memastikan produksi minyak dan pupuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Keduanya tidak boleh langka, jika subsidi menjadi persoalan, kami meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan subsidi dan instrumen-instrumen lainnya.

Selama ini subsidi selalu menjadi kesempatan berburu rente dan moral jahat akibat dispartisi disparitas harga yang terlalu tinggi antara barang subsidi dan non-subsidi. Untuk apa pemerintah memberikan subsidi yang begitu besar tetapi kemudian menjadi potensi penyimpangan orang-orang jahat mencari keuntungan besar dan persoalan ini tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Bagaimana jika ada opsi pemerintah tidak memberikan subsidi tetapi memastikan pasokan tersedia, tidak ada kelangkaan, dan harga tidak terlalu tinggi, mampu dibeli oleh masyarakat. Jadi sebenarnya bukan harga yang dipangkas dengan subsidi tetapi petani atau masyarakat dibuat mampu untuk membeli.

Soal impor jagung, kedelai, daging, gula dan beberapa komoditas yang masih bergantung dengan impor, kami meminta Kementan untuk mendorong produksi dalam negeri sebesar-besarnya di tahun 2022 ini. Bahkan, jika bisa dana *automatic adjustment* bisa digunakan untuk difokuskan pada peningkatan produksi. Tidak bisakah negeri kaya raya ini memproduksi berbagai komoditas itu dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita punya. Kenapa sulit sekali mencukupi kebutuhan sendiri tanpa tergantung dengan negara lain. Padahal, segalanya kita punya di negeri ini. Sebenarnya hanya butuh *political will* karena kerjasama kita bersama dan niat tulus semua pihak untuk membantu rakyat tanpa memburu rente dan bermoral jahat semata-mata mencari keuntungan.

Kami Fraksi Partai Nasdem dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan tentang urgensi perkembangan pertanian modern yang melibatkan sebesar-besarnya anak muda generasi milenial yang berjumlah 145,39 juta orang menurut BPS 2020. Di saat berbagai negara menggunakan teknologi canggih sedangkan negara kita masih menganut pertanian konvensional yang cenderung usang. Kementerian Pertanian harus mendorong pertanian modern dan keterlibatan anak muda sebagai langkah evolusi pertanian secara sungguh-sungguh. Jika tidak sangat percuma kita memiliki bonus demografi dan lahan pertanian yang sangat luas, ujung-ujungnya masih impor bahan pangan.

Pertanian modern dengan menggunakan teknologi canggih bisa dengan mudah menjalankan proses produksi secara massal yang tidak bisa dilakukan secara konvensional. Tinggal kemudian Kementan mendorong anak-anak muda untuk terlibat di dalamnya. Pertanian modern dan keterlibatan anak muda merupakan satu hal yang linier karena adopsi teknologi modern sangat mungkin dilakukan oleh anak muda sesuai dengan perkembangan zamannya yang sangat melek teknologi. Jangan berharap anak muda mau mengurus pertanian jika pertanian tidak punya visi pembangunan pertanian modern. Sebaliknya jangan mimpi pertanian maju bisa maju jika masih diurus oleh orang-orang tua yang tidak mau bertransformasi dalam dunia digital atau tanpa melibatkan anak-anak muda pintar di dalamnya. Oleh karena itu kami ingin melihat banyak program Kementan di tahun 2022 ini mengarah pada pengembangan pertanian modern, desain pelibatan anak-anak muda untuk mengurus pertanian.

Terkait dengan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang mengambil anggaran dari pengurangan *automatic adjustment* tahun 2022 sebesar 147,3 miliar pada Badan Ketahanan Pangan, kami sangat mengapresiasi program ini. Kami mendorong Program P2L disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat untuk melahirkan kesadaran pemenuhan pangan sendiri bagi masyarakat dengan memanfaatkan ruang yang ada di pekarangan rumah masing-masing. Kami juga ingin melihat masyarakat bisa menanam sendiri sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan rumah untuk menumbuhkan kesadaran pengembangan pertanian dengan menggunakan teknologi seperti *indoor farming*, menggunakan teknologi *control environmental agriculture*, *control light* lampu ultraviolet dan sebagai sebagainya sebagaimana jargon tanaman waktu.. tanamlah walau satu tanaman pangan di halaman rumah.

Bisa juga Kementerian RI bekerja sama dengan kementerian lain yang membawahi sekolah dan pesantren untuk mengajak atau membina sekolah dan swasta atau siswa-siswa di sekolah untuk menanam di pekarangan sekolah atau di pekarangan rumah masing-masing. Harapannya akan lahir generasi masa depan yang cinta pertanian dan memiliki *mindset* bahwa pertanian tidak identik dengan kotor, konvensional, kemiskinan, *out of date* dan terbelakang tetapi pertanian itu keren dan modern.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sudah Pak masih lama masih panjang?

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Sedikit lagi.

Mungkin Pak Menteri kami kemarin bicara soal agar pupuk ini kita tidak terlalu lama-lama karena kita selalu bahas soal pupuk. Kemarin kami sudah sampaikan agar sebenarnya pupuk itu ada dua hal yang kita harus selesaikan ya di dalam kesimpulan RDP juga sudah. Ini soal e-RDCK itu harus kita memiliki data jelas. Kalau data jelas itu berarti kita harus memiliki ya memiliki pengawas yang ketat. Untuk itu kami harapkan agar koordinasi untuk penyuluh ya di tingkat kementerian atau di tingkat kabupaten.

Setelah kita memiliki e-RDCK itu maka berapa jumlah e-RDCK itu otomatis itu ke Pupuk Indonesia dalam hal distribusi. Kalau kita punya data sudah jelas dan tepat itu maka bocornya itu ada pada Pupuk Indonesia. Bagaimana pengawasannya ya itu jadi kami harapkan dalam kesimpulan itu, tugas kita untuk menyelesaikan data-data yang jelas dan pengawasan terhadap Pupuk Indonesia itu juga semakin jelas. Jangan sampai Pupuk Indonesia dia tenang saja padahal bocornya dari dia, pengawasannya di bawah itu kurang. Berapa orang yang sudah mendapatkan pupuk itu dan berapa yang tidak, semuanya harus tahu harus memiliki kesimpulan di tingkat-tingkat desa, tingkat kecamatan maupun provinsi. Jadi saya kira..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup Pak?

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Saya kira itu Pak Ketua. Saya kira cukup.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi Pak Abdullah Tuasikal saya jelaskan. Ini harus ada sosialisasi yang sangat masif sekali bahwa permintaan pupuk subsidi itu 23 juta ton sekian tetapi pemerintah hanya mampu menyiapkan 9,2 juta ton. Ini yang belum pernah rakyat petani di bawah ini mengetahui. Kan nama saya sudah masuk, saya sudah mengusulkan, enggak ada kok, kok saya enggak dapat. Permasalahannya kan di sini. Jadi kalau bisa hari ini kita pecahkan bersama.

Saya maunya di bawah Menteri Syahrul Yasin Limpo di bawah periode Komisi IV 2019-2024 di bawah para Direksi PIHC masalah pupuk selesai dengan baik dan benar. Ini karena kurangnya sosialisasi tadi Pak, karena apa, kan saya pernah ngomong di sini “kalau mau makan, datang ke rumah saya”. Di rumah saya banyak makanan tapi yang datang 30 orang, makanannya untuk 10 orang Mbak. Inilah yang kurang disosialisasikan, ini tugasnya siapa ya nanti kita bahas bersama apakah Kementerian Pertanian ataupun tugasnya PIHC memberikan informasi distributor, agen dan kios. Ya jelas nanti kita cari solusi jalan terbaik itu saja.

Lanjutkan Mbak Anggi.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ketua, sedikit lagi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-P. NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Ini kalau kita bahas lagi lama lagi karena kita sudah ada RDP sudah ada penjelasan. Nanti mau ke mana ini kan kita punya Pimpinan-Pimpinan kita punya Kapoksi ada tinggal saja bicara saja. Saya kira itu Pimpinan biar jelas karena kalau kita putar-putar lagi ini baru satu. Pupuk saya memang jelaskan agar kita tidak balik-balik lagi, nanti lain lagi ya nanti lain lagi kita bicara soal ekspor impor, bicara soal jagung bicara kita balik-balik lagi. Saya kira Pak Ketua, kita dari mungkin ya tapi saya kira dari Anggota sudah jelas ini tinggal saja kementerian apa komitmen dari mitra kita ya tinggal komitmen saja. Kalau sudah komitmennya sudah jelas tinggal urusan Pak Ketua ketuk saja sudah selesai. Namun, kalau ada yang belum selesai silakan saja. Ini usulan dari saya. Dari teman-teman, saya tidak memaksakan

kehendak karena dari fraksi masing-masing tapi kalau sekepipikiran dengan kita saya kira seperti itu. Kalau enggak kita lama lagi ini pupuk bisa 1 jam 2 jam lama lagi atau lain-lain.

Saya kira terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik terima kasih.

Ibu Dwita Ria, silakan Ibu.

F-P. GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV serta Saudaraku Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta seluruh jajarannya.

Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra. Ini ada 14 poin tapi mungkin tidak saya bacakan semua nanti akan saya serahkan secara tertulis. Fraksi kami mengapresiasi langkah Kementan melakukan pengurangan *automatic adjustment* Tahun 2022 sebesar 147,3 miliar pada Badan Ketahanan Pangan yang dimanfaatkan untuk kegiatan P2L, Bimtek, Pasar Mitra Tani, Toko Tani dan kegiatan monitoring stok dan stabilitas harga pangan masyarakat Indonesia. Kami berharap segera diusulkan untuk dilakukan perubahan agar program dapat segera berjalan.

Kemudian pada blokir BKP tahun 2022 sebesar 262,3 M. Terkait dengan Badan Pangan Nasional Pak, sejauh mana progress Bappenas dalam hal tersebut?

Selanjutnya Tahun 2020 BPPSDM menggulirkan program penumbuhan wirausaha muda petani sebanyak 500 ribu kelompok tiap tahunnya dengan anggaran tahun 2022 dialokasikan 21,6 miliar. Sepanjang tiga tahun ini bagaimana monitoring evaluasi dan strategi mendukung capaian program tersebut karena Pak, saya pikir ini harus bersinergi dengan program nasional kita misalnya kita membuka kawasan bawang merah, aneka cabai atau kebun buah. Nah, itu kita harus bersinergi. Ketika ada usulan wirausaha pemuda muda pertanian ini, kita harus arahkan bahwa mereka juga harus bisa membantu memikirkan bagaimana program-program nasional yang dilaksanakan tersebut.

Seperti kemarin di Brebes itu kita berlimpahnya panen bersama bahwa kalau ada wirausaha muda petani yang di sana bergerak bersama-sama tentunya ini akan mengurangi juga cepat memanfaatkan hasil pertanian tersebut. Jadi kami tidak hanya sekedar kegiatan ini menghabiskan anggaran

tapi mempunyai tolak ukur yang jelas. Apakah mereka akan mengusahakan paska panen ataukah mereka akan mengusahakan di budidayanya atau juga di ternaknya.

Kemudian Fraksi Gerindra menyambut baik realokasi 140 M kegiatan Food Estate di Kalteng pada Dirjen PSP. Realokasi ini sangat baik mengingat kebutuhan petani terkait infrastruktur dan Alsintan prapanen masih sangat tinggi. Nah, berapa saja penambahan infrastruktur dan Alsintannya secara nasional dari realokasi tersebut?

Yang selanjutnya masih rendahnya capaian produksi komoditas utama khususnya daging Pak, swasembada daging. Tadi sudah disampaikan Pak Tuasikal kita ini kaya raya, negara kita ini negara dengan iklimnya yang cukup mendukung tapi kita sampai sekarang masih tidak bisa swasembada daging. Tahun 2020 sebanyak 353,63 ribu ton, tahun 2021 turun mencapai 343,75 ribu ton.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri pada tanggal 8 Desember ke Lampung. Di situ kita dengan Pak Dirjen Pak Nasrullah itu *launching* tentang *launching* kelahiran 100 ribu pedet Belgian Blue dan Sikomandan. Nah, saya ingin bertanya tindak lanjutnya seperti apa Pak strateginya? Apakah memang Lampung ini akan menjadi rujukan untuk memenuhi kebutuhan daging secara nasional. Kami juga perlu meminta data berapa kebutuhan daging pemenuhan produksi daging dari berbagai daerah sehingga kita tahu bahwa daging ini saat ini memang belum mencukupi. Nah, saya rasa ini memang perlu komitmen Pak, tidak perlu 3-4 tahun, 2-3 tahun saja kalau Lampung ini saja 100 ribu panen pedet kemarin bisa berhasil ini setahun dua tahun kita sudah bisa mencapai swasembada pangan swasembada daging. Belum ditambah dari daerah-daerah provinsi lain NTT dan juga beberapa daerah dari Jawa Barat.

Kemudian untuk minyak Pak yang hari ini masih heboh di TV. Tadi kita lihat begitu minyak itu harganya mahal tersedia penuh, begitu harganya diturunkan malah tidak tersedia. Di Jawa Timur tadi pagi itu mengantre minyak, di Lampung sendiri untuk mendapatkan minyak itu juga sulit. Harganya pun tidak Rp14.000 seperti yang disampaikan oleh pemerintah, masih ada yang Rp20.000, Rp21.000 bahkan Rp24.000. Nah, itu bagaimana peranan Kementerian Pertanian sendiri dalam mengatasi masalah tersebut? Langkah-langkah yang dilakukan koordinasinya dalam mencegah kelangkaan minyak goreng.

Nah, mungkin itu saja Pak yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan nanti secara tertulis. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam warahmatullahii wabarakatuh.

Silakan Pak Suhardi Duka.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen dan Pak Dirjen.

Terima kasih terhadap penyesuaian alokasi *automatic adjustment* sebesar 680 miliar yang tadinya ketahanan pangan 409 menjadi 262 dan begitu pun dengan dirjen-dirjen yang lain terjadi penyesuaian pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat dapat menerima.

Terhadap prioritas 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dan sasaran ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah dan tenaga kerja, target utamanya adalah produksi padi 55,20 juta ton dan jagung 20 juta ton. Saya kira menjadi sesuatu yang perlu didukung dengan anggaran yang cukup. Artinya jangan sampai kita memasang target besar tetapi dukungan anggarannya kecil ini juga menjadi tidak seimbang.

Selanjutnya dibutuhkan sedikit suara Kementerian Pertanian dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah utamanya dalam membela pasar produk pertanian, di mana sektor pertanian ini selalu menjadi korban atas pengendalian inflasi seperti kenaikan harga minyak goreng. Kita semua merasakan itu ibu-ibu rumah tangga tapi seharusnya pemerintah menempuh jalan subsidi karena subsidi adalah eksistensi sebagai kita negara Pancasila tapi yang dilakukan adalah menempuh dengan jalan potongan harga atau menggunakan HET. Dampaknya harga produk pertanian menjadi lemah dan menjadi turun. Di lain sisi kalau kita lihat bagaimana negara menerima upeti besar melalui sektor kelapa sawit, BPDPKS saja memungut 130 triliun. Pajak dari sektor sawit juga ratusan triliun diterima oleh negara tapi kenapa negara tidak mau mengeluarkan subsidi untuk minyak goreng, justru mengeluarkan HET. Ini yang saya minta kepada Menteri Pertanian agar sedikit disuarakanlah membela petani dalam menjaga pasarnya sehingga produk pertanian itu tidak selalu menjadi korban di dalam alasan bahwa pengendalian inflasi.

Di lain sisi kita lihat tidak adilnya lagi kita sudah mengeluarkan pemerintah mengeluarkan HPP terhadap produk gabah. Ya saat panen gabah turun, harga gabah turun, kenapa, karena Bulog tidak mampu membeli sesuai dengan HPP yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini juga tidak adil. Jadi marilah kita lihat petani secara menyeluruh ya jangan kita selalu melihat petani ya miskin karena memang kebijakan yang memiskinkan. Di lain sisi petani adalah pahlawan. Kalau petani kita mogok bagaimana kita mau mengkonsumsi dan lain sebagainya. Anggaran pemerintah juga di sektor pertanian kan selalu kurang. Ini yang saya minta supaya lantang-lantanglah sedikit kita bicara tentang memperjuangkan petani.

Selanjutnya pupuk, oleh Komisi IV meminta supaya ada HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk non-subsidi tapi sampai sekarang kan belum keluar ya justru yang keluar adalah HET tentang minyak goreng.

Selanjutnya kami juga Komisi IV kemarin telah memberikan *support* kepada Kementerian Pertanian untuk tetap membuat peralihan secara konvensional dengan relaksasi terhadap Balitbang. Kami minta dengan waktu yang relaksasi ini benar-benar supaya kita bersiap Balitbang ini bisa fungsional pada tahun 2023 dengan tentunya mengedepankan bagaimana inovasi hasil-hasil pertanian dapat diimplementasi di daerah. Utamanya juga dalam menjaga peran dan fungsi balai-balai yang ada di daerah yang selama ini kami lihat kami bisa bekerja sama dengan fungsional utamanya dalam mengelola inovasi-inovasi pertanian.

Juga kami ingin mengingatkan anggaran Food Estate untuk tahun 2022 ini masih besar. Kami minta agar tidak lagi menjadi temuan BPK pada tahun 2022 karena 2020 kan ada temuan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya? Saya juga khawatir tahun 2021 ada temuan. Jadi Pak Menteri tadi sudah menyampaikan sudah 93% cuma BPK itu ditindaklanjuti, sisa 16% yang masih belum. Saya kira ini menjadi catatan kita bersama bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh menteri dalam menindaklanjuti hasil-hasil BPK sudah sewajarnya hanya saja kalau kita sudah tindak lanjut hasil pertemuan apa namanya hasil temuan BPK jangan lagi terjadi temuan berikutnya. Ini kan yang menjadi persoalan kita.

Terakhir salam dari petani Sulawesi Barat di Dapil saya atas bantuan peralatan pertanian yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian, begitu juga bibit dan lain sebagainya hanya memang pupuk tidak apa namanya sesuai dengan harapan petani sampai dengan saat ini.

Demikian terima kasih Pak Menteri.

*Wallahul muwwafiq illa aqwamin tharieq,
Wassalamualaikum warahmatullahii wabarakatuh.*

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Terima kasih Pak Suhardi Duka. Selanjutnya Pak Johan, Bang Johan Rosihan silakan.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

Ibu Ketua yang saya hormati ... seluruh Anggota.
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya.

Pertama saya dari hasil pemeriksaan BPK, saya meminta Pak Menteri serius dan transparan. Bagaimana soal tindak lanjut dari jumlahnya ini karena dari laporan yang diberikan kepada kita ini tahun 2020 saja masih ada sisa.

Tahun 2020 saja masih ada sisa itu 15 pertemuan, apa 45 temuan dan 115 rekomendasi. Mungkin perlu disampaikan kepada kita apa persoalannya sehingga temuan 2020 saja masih ada sisa. Jangan bicara 2021. 2021 sudah dicoba di ditindaklanjuti tapi masih ada 5 yang tidak sesuai, berarti ini kan ada satu soal Pak. Apa persoalannya, apa kesulitannya sampaikan kepada kita biar juga publik juga tahu apa persoalannya. Artinya ada upaya tapi tidak bisa dipenuhi kan itu dari laporan yang Bapak berikan karenanya mohon transparan soal ini karena ini soal kinerja keuangan kita karena anggaran kita sedikit Pak, jadi nilai bukunya juga harus bagus. Itu yang pertama.

Yang kedua masih soal BPK. Ini ada temuan di Food Estate. Di Food Estate itu ada temuannya banyak di sini ada 30.000 hektar senilai 15,2 miliar. Ada kurang memenuhi ada 1,2 F. di BPKP belanja dari hanya nilai produk ini 1.. 1 miliar. Nah, karenanya menurut saya ini penting, tidak perlu anggaran Food Estate ini di apa namanya di *explain* saja semua begitu dialihkan kepada hal-hal yang lain ya.

Nah, yang berikutnya Pak ini bertentangan dengan pidato Bapak tadi menjadikan Food Estate sebagai kegiatan utama. Food Estate di *adjustment* 120 miliar tapi pada saat yang sama Food Estate juga dijadikan sebagai kegiatan utama untuk memenuhi kelangkaan-kelangkaan apa namanya stok kita tadi itu. Mohon dijelaskan Pak ini menurutnya kalau tidak dijelaskan ini paradoks Pak ya. Ada keinginan untuk meningkatkan produksi tetapi pada saat yang sama juga dilakukan *adjustment* 100 120 miliar dan kemudian diperkuat dengan temuan BPK bahwa Food Estate ini bermasalah karenanya perlu menjadi penting catatan ini Bu Ketua soal Food Estate ini kita perlu segera bekerja dari panitia kerja yang sudah ditetapkan.

Yang ketiga, saya ingin bertanya Pak langkah Pak Menteri soal bagaimana mengantisipasi soal prediksi inflasi pangan yang tahun ini diperkirakan cukup tinggi sebesar 3,5% Pak, dibandingkan dengan tahun yang lalu tahun ini cukup tinggi. Satu contoh saja soal kedelai ya soal kedelai, saya ingat janji Pak Menteri tahun kemarin ketika Bulan Januari atau Februari ada *statement* Presiden Jokowi waktu itu ingin apa namanya ingin diselesaikan persoalan kedelai ini. Kemudian Pak Menteri dengan lantang kemudian berjanji di hadapan Komisi IV ini ya. Mungkin Pak Ketua masih ingat itu soal janji Pak Menteri menyelesaikan persoalan kedelai dalam dua kali masa tanam, tapi ketika kita melihat apa melihat target produksinya dibuat gagah pakai juta tapi 0,2 juta kan sama dengan 200 ribu itu ya tapi tulisannya 0,2 juta. Kebutuhan kita sudah disampaikan oleh Pak Ketua pada Raker sebelumnya sekitar 2-3 juta ton kebutuhan nasional. Target produksi kita cuma 200.000. Hari ini kita dapat berita Pak, saya tadi pagi nonton apa saya lihat di Kompas TV itu bahwa Brazil, negara Brazil itu, itu tidak bisa memenuhi target produksinya dari 450 juta targetnya itu hanya terpenuhi 125. Demikian juga Amerika sebagai produsen kedelai, tidak bisa juga memenuhi targetnya. Ini akan terjadi apa namanya terjadi kelangkaan kekurangan produksi kedelai karenanya kita diberi *warning* bahwa pada bulan Maret harga tempe tahu akan naik.

Nah, karenanya mohon...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya jelaskan sedikit bukan bulan Maret, mungkin rencana minggu depan karena mereka akan demo.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Mungkin lebih cepat lebih baik kayaknya Pak Ketua. Nah, karenanya saya minta keterangan Pak Menteri ini ya soal janji yang dua kali masa tanam itu dengan mengantisipasi prediksi inflasi pangan yang naik sekitar 3,5%.

Demikian juga soal apa namanya minyak goreng. Mungkin betul Pak, ini kita tidak bukan bukan apa namanya bukan tugas dari Menteri Pertanian tapi karena kita sebagai stok pangan itu dan itu kita penghasil CPO tertinggi itu. Saya tidak mau bahwa ada kesalahan di Kementerian Pertanian dan mitra Komisi IV ini. Nah, jelaskan kepada kami Pak kenapa Dirjen BUN ini sampai sekarang tidak ada di tengah kelangkaan minyak goreng ini. Maksud saya itu jangan sampai ada kesalahan di kita Pak, karena Ombudsman itu menyampaikan tiga hal kenapa harga minyak goreng itu naik. Pertama ditimbun, yang kedua dibuat langka, yang ketiga terjadi kepanikan di tingkat konsumen. Nah, salah satu alasannya itu adalah soal bahan baku, bahan baku kalau bicara bahan baku sudah masuk ke kita Pak tapi kita enggak punya Dirjen di apa namanya di perkebunan ini. Jadi mohon jelaskan kepada kami Pak minimal menurut versi Kementerian Pertanian ini kira-kira bagaimana kita mengantisipasi soal harga minyak goreng yang tidak bisa ditangani secara baik oleh pemerintah ini.

Yang terakhir Pak Ketua, saya ingin menegaskan saja dan gambarnya sudah saya *share* ke Pak Ketua beberapa hari yang lalu. Ada pihak-pihak ya, ada pihak-pihak yang membagi pupuk di luar ketika pupuk ini langka dan yang melakukan membagi-bagi pupuk itu adalah bukan Anggota Komisi IV. Saya tidak tahu apa hubungannya sama Bapak Menteri, satu pulau kah, satu partai kah atau apa begitu, tapi di apa di akun Instagramnya itu bagi-bagi pupuk Pak Ketua. Kita Anggota Komisi IV yang bermitra dengan apa namanya dengan Menteri Pertanian yang selalu mengatakan tidak mau meninggalkan Komisi IV, kita "gigit jari" Pak Ketua dan kita dikomplain. Kalau "gigit jari" masih mending ini dikomplain. Kok Komisi IV bisa kayak sebelah, kan gitu Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya Pak Johan nanti saya kasih pupuk satu kilo ke rumah, tenang saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik, terima kasih.

Tentang BPK itu Pak Menteri itu karena kita sayang sama Pak Menteri jadi diingatkan apakah *action plan*, tindak lanjut dari temuan itu sudah dijalankan. Kalau tadi ada tinggal 16% kalau tidak salah ya yang belum selesai itu sejauh mana sebenarnya, sudah dijalankan atau belum dan seperti apa.

Selanjutnya Pak Edward Tannur sedang keluar, Ibu Ibu Riezky Aprilia alias Kiki.

Kayaknya harus pindah deh itu masih bermasalah biar suaranya terang cemerlang.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih Ibu Ketua.

Ibu Ketua, Bapak Ketua, Pak Menteri.

Hari ini kan kita membahas *automatic adjustment* ya. *Automatic adjustment* ini yang saya rasa relevansinya dengan kondisi pangan hari ini dan cita-citanya Pak Menteri ingin meningkatkan, mewujudkan, mencapai itu tadi yang mungkin Ibu Ketua sampaikan *road map*-nya seperti apa, *action plan*-nya seperti apa karena kan Bapak Menteri beserta jajaran tidak akan bisa lepas dari RPJMN dan Renstra, kan begitu ya nah itu pertama.

Kedua, permasalahan juga hari ini adalah permasalahan klasik tapi yang perlu diingatkan bahwa kemarin jawaban dari jajaran Bapak terkait pupuk, Ombudsman sudah mengeluarkan lima poin terkait pupuk. Kemenko juga sudah sering kali Ratas, bukan begitu Pak Sekjen? Ya tapi saya harap Komisi IV ini juga mendengarkan nasehatnya Pak Menteri ya bahwa terkait pupuk ini memang permasalahan klasik dari zaman kapan tapi kalau Pak Menteri pengen punya *legacy* benahilah pupuk ini walaupun tidak bisa langsung tapi mulai secara perlahan.

Kemudian ketiga, terkait dengan beberapa program-program Bapak yang sudah di-*share* tadi mudah-mudahan ini bisa betul-betul jalan dan mungkin kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut untuk ini oleh teman-teman ya mungkin dibuka *chance* untuk itu, itu Pak Menteri ya karena kayaknya kalau dilihat tadi mungkin ada beberapa hal yang ingin kita pertanyakan.

Nah, kemudian keempat Dirjen BUN, Irjen katanya kemarin sudah ada Pak Menteri. Apakah Pak Menteri begitu selektifnya sampai sudah hampir berapa lama tidak ada oknum-oknumnya yang didudukan di dalam sini begitu ya. Jadi jangan sampai Bapak menyalahi administrasi ya.

Nah, kemudian terakhir pada dasarnya kita berharap Kementerian Pertanian dengan yang dibintang-bintang kemudian juga waktu kemarin Badan Pangan Nasional itu, ini sekali lagi kita ingatkan. Jangan pas mendekati, baru kayak orang "kebakaran jenggot" itu ya dan jajaran-jajaran

Bapak juga harus bersiap. Jangan sampai nanti kayak kejadian Pak Fajri kemarin, bingung sendiri karena Badan Pangan Nasional menurut penuturan Pak Sekjen itu 2022 akhir itu sudah harus *running*, begitu Pak Kasdi ya? Jadi bagaimana sih, bagaimana sih strateginya Kementan untuk menghadapi peraturan, itu peraturan Presiden ya BPN itu supaya untuk segera dijalankan walaupun kita belum tahu siapa orangnya, bagaimana bentukannya secara konkrit lebih baik itu segera diantisipasi.

Mungkin itu saja Ibu Ketua, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik, terima kasih. Pak Edward Tannur.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Baik, terima kasih.

Selamat siang untuk Pimpinan dan Anggota Komisi IV baik yang hadir secara virtual maupun secara fisik.

Yang saya hormati Menteri Pertanian beserta jajarannya.

Terima kasih banyak hari ini kita bisa saling bertatap muka untuk menyampaikan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara dan sebagai pejabat negara. Mudah-mudahan sementara yang kita sampaikan ini betul-betul serius, tulus, ikhlas, dan jujur karena ini memang kita berbicara memang diulang-ulang tapi yang penting kita serius. Kita semua kerja, tidak ada yang tidak kerja jadi baik itu kata pembuka dari saya. Ini karena tutup masker ini hidung juga saya sakit. Ini Covid ini waduh.

Jadi dari saya mewakili Partai, Partai Kebangkitan Bangsa dalam menyampaikan pendapat dari fraksi kepada atau di dalam rapat kerja kita, rapat kerja kita hari ini ya. Yang pertama bahwa tidak bisa kita pungkiri korelasi yang erat antara pupuk dan hasil produksi. Maka hasil produksi pertanian dan perkebunan dan lain-lainnya ya, maka dengan tingginya harga pupuk dikhawatirkan akan menyebabkan meningkatnya harga dan biaya produksi. Akibatnya petani akan menjual produksinya dengan harga tinggi karena biaya produksinya tinggi. Apabila tidak dilakukan satu kebijakan dengan menentukan harga eceran tertinggi maka ke depan petani ini selalu berada pada korban, pihak korban. Untuk itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melakukan koreksi, memberikan masukan dan supaya pemerintah menindaklanjuti apa yang disampaikan ini menjadi perhatian khusus. Jangan pada saat produksi ayamnya meningkat, harga ayamnya jatuh atau harga telurnya jatuh. Membuat petani hidup dalam ketidakpastian. Pemerintah hadir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat. Kalau pemerintah hadir hanya untuk senang-senang saja bubar saja. Ini kan menyedihkan. Kami sebagai wakil rakyat sebagai wakil masyarakat perlu menyampaikan hal-hal ini sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jangan sampai terjadi berulang tahun di saat mau ada hari raya harganya melonjak tidak karuan, menjaga kestabilan. Jadi intinya menjaga kestabilan dan menjaga,

menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok kebutuhan. Ini kan merupakan tugas dari pada Kementerian Pertanian dan mungkin juga ikutannya Kementerian Perdagangan.

Dua, harus adanya kearifan lokal dan daerah-daerah khusus. Misalnya pada program pengembangan ternak. Jangan ternak yang didatangkan misalnya untuk wilayah NTT iklim dan kondisi alamnya berbeda dengan di Jawa. Jadi jangan menggeneralisir program-program itu. Kalau kita hanya melihat satu wilayah dan dilakukan secara menyeluruh, yang kita jumpai adalah kegagalan karena banyak sapi-sapi yang ke sana itu mati. Dia belum penyesuaian dengan lingkungan setempatnya, keadaan setempat sudah tewas duluan. Jadi ini harus bagi, bagi dirjen-dirjen yang melakukan pengadaan sapi atau ternak lainnya perlu dikaji secara baik.

Berikutnya target, target jagung untuk Indonesia pada tahun 2021 dengan tahun 2022 eh 2022 malah menurun targetnya. Ini maksudnya artinya tidak punya semangat lagi untuk kerja kebun jagung atau bagaimana ini. Kan kebutuhan Indonesia ini sangat tinggi. Bahkan, masih impor jagung ini. Jadi ini harus mendapat atensi khusus tentang jagung ini makanan rakyat bukan, bukan makanan manusia saja. Sapi, kambing, ayam semua makan jagung jadi ini adalah satu produksi yang sangat strategis bagi NKRI ini. Jadi kita harus memberikan perhatian khusus apalagi dengan adanya Food Estate. Bahasa Inggris ini juga kadang-kadang. Lumbung pangan ini kan harus prioritas dan juga jagung.

Saya lihat tadi di penyampaian ini yang dibicarakan Kalimantan Tengah terus, Kalimantan Tengah terus. Di NTT juga ada Food Estate lumbung pangan tapi saya lihat tidak ada digubris juga di sini. Jadi itu membuat kami selalu masyarakat bertanya, ini serius atau tidak. Jangan hanya ngomong doang. Jadi saya bilang, sabar kita tanya dulu Menteri nanti rapat kita tanya dulu Pak Menteri. Artinya ini sudah dicanangkan dua tahun serius atau tidak ini? Jangan kita hanya turunkan Alsintan tetapi struktur atau penyediaan air baku dan lain-lain tidak ada. Ini mau tanam mau Food Estate tapi bendungan tidak ada ini di Sumba Tengah ini akhirnya kekeringan. Maka itu saya mohon Panja dipercepat supaya kita turun dan kita lihat memberikan solusi dan masukan kepada pemerintah. Sebagai wakil rakyat kita harus turut aktif dalam mempersiapkan lumbung pangan untuk Indonesia.

Satu lagi, dengan adanya Covid yang kita belum tahu kapan berhentinya, otomatis produksi pangan akan menurun, ketersediaan pangan akan menurun. Maka di sektor-sektor pangan ini kita harus betul-betul fokus. Jangan kita hanya mengandalkan impor-impor-impor itu sangat berdampak pada perekonomian Indonesia. Seperti kedelai, kedelai kan, kedelai kan sudah naik harganya. Seperti tadi teman-teman bilang, di satu pihak Indonesia sangat membutuhkan kedelai karena kita tahu bahwa makanan wajib ya atau makanan khas khususnya di Jawa itu adalah tahu dan tempe. Jadi ini sebenarnya bahan pokok untuk produksi tahu dan tempe. Coba dipikirkan bagaimana kita untuk bisa memproduksi kedelai secara mandiri. Kalau kita hanya mengandalkan impor, saya kira sampai kapanpun devisa kita akan lari ke luar karena itu sudah jelas.

Jadi saya kira saya juga tidak usah menyampaikan terlalu banyak mengenai pupuk, minta maaf Ketua. Pupuk ini memang saya dengan saya punya tidak tahu malu saya sering menjelaskan kepada masyarakat e-RDKK tahu apa tidak. Kamu punya e-RDKK itu butuh 23 juta ton itu nilainya sekitar berapa itu 33 triliun atau berapa itu. Jadi saya bilang, 33 triliun atau 70 triliun itu, negara hanya mampu memberikan subsidi bantuan harga ini 30 triliun dan itu identik dengan 9,2 juta ton. Jadi kamu harus bisa memberikan masukan, jangan kamu e-RDKK tulis kamu punya mau jadi pupuk itu sebenarnya bukan langka bukan tidak ada, ada cuma sistem distribusinya tidak beres, memusingkan, tidak beres. Tidak beres di mana? ya orang-orangnya yang tidak beres. Coba kalau ada ya mungkin orang masih, ini langka. Jadi ini sekedar masukan karena kami sering turun ke lapangan. Sebentar lagi tanggal 18 kami sudah reses turun ke lapangan. Jadi bahwa kami tidak tahu malu ini jelaskan berulang-ulang kali, berulang-ulang kali. Terakhir kami pasrah mau bagaimana lagi ini.

Jadi kami minta kepada ya Kementerian Pupuk Indonesia juga tolong pikirkan ini. Kalau hanya mampu 10 ya buat pengumuman dan edarkan surat edaran, berikan penjelasan secara transparan dan komprehensif. Jangan Anggota Dewan yang disuruh jelaskan, walaupun tidak disuruh tapi tugas kami untuk menjelaskan. Kira-kira begitu.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Masih lama?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Sudah ini terakhir sudah Bu.

Jadi mengenai hal-hal yang lain, saya hampir saya lupa. Mengenai Alsintan ini *dryer* yang tegak lurus bangunan yang 2 miliar lebih ini untuk apa. Orang tidak mungkin bawa *dryer* bawa padi itu dikasih kering, jaraknya berpuluh-puluh kilo 30 ton ini siapa yang mau bawa begitu banyak. Jadi yang *dryer* kecil itu cocok, yang 3 ton itu masih cocok. Jadi kami minta kami mohon agar diambil sikap yang jelas sebelum penetapan anggaran ini. *Dryer* yang tegak lurus itu diganti saja yang atau yang lain-lain. Percuma adakan itu barang tidak bermanfaat, ini kan kita menipu rakyat ini. Kita ini bukan lahan pertanian yang luas beribu-ribu hektar. Di luar pulau ini kan setempat-setempat-setempat jadi berpikir yang praktis dan bisa diterima oleh masyarakat. Kalau mau bilang rakyat terkonsentrasi tidak mungkin bisa. Kayak tadi *mobile dryer* itu cocok itu kita apresiasi.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sudah?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Tapi ... satu yang nenek moyang tinggi besar ini 30 ton ini kita mau bikin sekering apa di situ ya. Yang 30 ton ini Pak Menteri, 30 ini di sini lihat 30 ton ada

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau enggak salah adanya yang 10 ton. Mana, mana Dirjenya? Ada 10 ton ya? Yang 30? Yang.. yang mengusulkan siapa? Yang mengusulkan siapa? Enggak yang mengusulkan siapa tadi, *you* kan bilang yang mengusulkan 30 ton siapa yang mengusulkan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ada poin ketiga.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi *you* bilang enggak ada tapi ada yang mengusulkan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Antara romawi II Dirjen Tanaman Pangan poin ketiga dryer vertical 30 ton stainless.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terlalu besar.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Non-stainless.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kurang efektiflah. Jadi saya minta itu dihapuskan, saya enggak mau.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Satu unit, harganya dua miliar lebih. Angka romawi II itu Dirjen Tanaman Pangan poin 3, poin 3, ada kok poin 3, poin 3.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Untuk berapa unit?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Halaman pertama aspirasi Komisi, poin 2 angka 3.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak gini kalau yang 30 ton itu berapa biayanya?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

2 miliar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau yang 10 ton itu berapa? Ya kenapa yang eenggak yang, kalau terlalu sampai 30 ton itu paling tidak untuk pengusaha menengah. Kalau yang 10 ton itu paling eenggak untuk Gapoktan. Tadi anda mengusulkan siapa yang mengusulkan supaya saya tahu. Kalau dua yang *mobile* itu lebih banyak dibutuhkan lebih efektif.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Eenggak ada Pak, 10 ton saja Pak.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Ini ada 10 ton 1 miliar lebih. Kalau yang *mobile* 3-5 ton itu harganya 28 juta saja, yang *mobile* 3-5 ton itu harganya 28 juta saja itu lebih pas Pak 3-5 ton.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Sedikit Pak Ketua.

Kalau kita bicara *dryer* pada wilayah-wilayah yang memang lumbung padi, *dryer* yang 10 ton itu tidak efektif seperti Sulsel Sulbar tidak efektif walaupun saya tidak mengusulkan ya. Bukan, memang di Sulsel itu yang ada itu 30 ton bahkan kalau masih ada lagi yang 50 ton, 50 ton karena memang satu kali *dryer* itu 18 jam satu kali masuk. Jadi kalau hanya kecil *dryer*-nya berarti hanya dua jam dimakan oleh biasa di penggilingan-penggilingan besar itu main di antara 7 ton per jam. Jadi kalau hanya 10 ton satu jam saja penggilingan jalan sudah selesai.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke saya paham Pak Suhardi Duka. Jadi begini loh, kalau tadi saya katakan kalau 30 ton itu untuk pengusaha menengah. Kalau kita kan tujuannya bukan ke pengusaha menengah, tujuan kita kan Gapoktan ya kan, tidak perlu sedemikian harus secepatnya ya. Jadi saya jangan sampai ada yang seperti itu, harus jelas.

Lanjutkan Bu Ketua.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ketua. Izin Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebentar. Bapak santai dulu. Bapak ngopi dulu ini sedikit lagi baru Bapak nanti.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ini terkait dengan ini Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya nanti nanti, sebentar saja.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Saya hanya satu kalimat saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Saya ngomong dulu terus Bapak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ya satu kalimat saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya kalau begitu enggak usah nanti ya, setelah ini sebenarnya Bapak. Bagaimana maunya, mau nanti atau sekarang?

Baik terima kasih. Ini menjadi salah satu, masa saya enggak dikasih kesempatan ngomong sama Pak Hermanto.

Salah satu atensi Pak Menteri tentang *dryer* itu tadi.

Silakan Pak Hermanto, saya juga enggak lama-lama, enggak pengen lama-lama. Silakan Pak Hermanto.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Sebentar Pimpinan, interupsi ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Biar Pak Hermanto dulu dong.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Bukan, ini masih jubir Fraksi bukan putarannya?

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sudah ini sudah pendalaman.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

PAN belum.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Eggak ada tulisan tadi. Eggak ada ini pendalaman Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Saya ini Fraksi PAN masa eggak ada.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya jelaskan saja baik-baik, eggak perlu begitulah ngomongnya lah bahwa anda juru bicara Fraksi PAN.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan, silakan, Pak Haerudin silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Oke terima kasih.

Ini kan persoalan apa ketelitian kita Ibu Ketua.

Pimpinan yang saya hormati,
Anggota DPR Komisi IV yang saya hormati,
Saudara Menteri Pertanian, seluruh jajaran Eselon I yang saya hormati
beserta mitra dari Pupuk Indonesia juga yang hadir yang saya hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

Kiranya saya kalau menurut Tatib boleh menyebut Saudara Menteri karena memakai jas. Kalau yang tidak pakai jas dalam rapat kerja tidak boleh menyebut Saudara Menteri karena wajib pakai jas Anggota DPR karena itu aturan Tatibnya kecuali RDP.

Saudara Menteri yang saya hormati.

Saya akan sampaikan beberapa hal ya, masukan dari awal kebijakan yang memang baik buat rakyat kita rasa-rasanya selalu ... dan Fraksi PAN dari awal tidak pernah ikut dalam ruang permainan apapun bisnis internal pertanian, tapi kita ingin di sini memposisikan diri sebagai mitra yang punya tugas pengawasan dan pengendalian. Bagaimana posisi agar ini benar untuk rakyat dan tepat untuk rakyat. Itu catatan dari kami yang pertama.

Yang kedua, dukungan kami untuk kebijakan Menteri Pertanian, saya Komisi IV ini menolak *eucalyptus* kecuali Fraksi Nasdem dan kami menerimanya. itu dan sampai hari ini pun kami masih bisa buktikan bahwa hasil penelitian Balai Pertanian itu baik *eucalyptus* untuk virus Covid ini atau Omicron ini. Jangankan *eucalyptus* hanya hasil penelitian yang begitu hebat dengan ilmu dan teknologi tinggi, dengan biasa pun cara kampung kita menangani Omicron juga bisa, tetapi karena kebijakan negara harus vaksin ya kita jalani dan ikuti vaksin. Tentu ini adalah sebagai bentuk pertimbangan. Kita ingin mendorong Menteri Pertanian jauh lebih berpihak pada kepentingan rakyat kita dan kita sadar betul di ruang kebijakan pertanian kita, di ruang kebijakan pangan kita berkeliaran para kompradornya, para mafianya yang merugikan rakyat. Kebijakan apapun menjadi jelek di bawah karena ruang konsolidasinya rendah.

Saya ingin sampaikan contoh, saya pernah me... Dirjen Horti. Kenapa saya kalau terima bibit dari Horti ini tidak maksimal, jelek. Saat saya WA-kan ini bibit yang baik saya cari sendiri, saya beli sendiri. Harganya sama kok dengan harga lelang. Ini problem kemitraannya itu harus diperbaiki. Sama kopi, sama ternak, sama ayam, dan itu ruginya negara miliaran rupiah karena hanya membela kawan kancak-kancak usaha. Tolong diperbaiki Pak karena yang dirugikan negara. Bayangin kita terima ayam mati 70% ayamnya, terima kambing ada yang belatung aduh luar biasa. Terima sapi yang sudah beranak lima, sapi dikirim. Luar biasa itu. Tolong mitra ini yang punya integritas yang sama-sama ingin membuat kebaikan untuk rakyat ini, jangan asal. Ini catatan-catatan kami ya.

Urusan ruang kebijakan pangan dengan sistem pertanian *corporate* yang Pak Dirjen apa Tanaman Pangan ingin sampaikan sering disampaikan butuh *corporate* yang mendampingi sebagai *off taker* di pertanian kita tapi KUR-nya minta ampun susahny setengah mati, apa ini. Saya, Saudara Yuris Direktur dan Umbi-umbian dan Aneka Tanaman Kacang untuk melakukan proses kemitraan kedelai karena hasil kedelai hasil BPTP itu baik di Garut itu yang Kadis Pertaniannya pun menolak kedelai di Garut tapi kita paksakan dengan cara ilmu dari BPTP. Hasilnya maksimal dan bisa jadi benih sumber hasilnya itu maka saya mendukung. Oh ini problemnya adalah di ruang teknis, dikonsolidasikannya rendah, bukan jelek kebijakan dari Kementan tapi di bawah secara teknis. Ini butuh betul-betul pengawasan. Nah, makanya Irjen dibutuhkan Saudara Menteri. Semua perangkat untuk proses konsolidasi ke bawah dibutuhkan agar program itu tepat maksimal hasilnya.

Saya berharap Garut jadi basis kedelai setelah melihat suksesnya tanaman kedelai depotnya yang kemarin. Mudah-mudahan paska itu jauh lebih baik. Kalau dikawal secara ilmu, benar dipeliharanya *Insyah Allah* jadi baik makanya target kedelai kita besar Fraksi PAN *Insyah Allah* mendukung tidak akan membuat masalah *barrier* apapun karena itu rakyat daripada ini kita terus impor yang kaya perseorangan, bukan rakyat. Makanya kita bagaimana caranya Pak Mencari KUR ini menjadi posisinya jauh lebih teknis lagi lebih mudah lagi tidak lebih sulit. Ini bank-bank ini ragu di bawah itu kecuali dia punya mitra pengusaha-pengusaha yang dianggap sudah menjadi mitra dia bertahun-tahun baru itu mudah, tapi itu juga jadi resiko bagi ... nah itu catatan-catatan kami.

Tentang pupuk di lapangan dari dulu lah ya. Dari pupuk itu sejak zaman dahulu kala begini-begini penyimpangan di bawah itu. Dulu loncat kebun pernah, ditangkap Dandim pernah, kemarin yang masalah begini juga terjadi sudah. Kan tinggal meningkatkan konsolidasinya di lapangan secara teknis. Saya rasa kebijakan yang sudah baik, alurnya sudah baik kalau diubah malah menjadi kerepotan semua orang, justru karena kita konsisten tapi terus dijaga dengan baik maksimal *Insyah Allah* jadi baik.

Bapak-bapak yang saya hormati termasuk para Anggota Komisi IV.

Tentu catatan ini kita sudah ada punya catatan ini semua dan kalau tadi dari Fraksi PKB membongkar kembali ini belum ada kesepakatan kita artinya dari catatan-catatan ini, karena di catatan ini lah ada satu *hair dryer*-nya setiap Anggota setiap kita bisa mendorong setiap Dapil jadi 2,2. Tapi saya jujur ya Pak Saudara Menteri kalau untuk Karawang *dryer* vertikal yang 10 ton tidak terpakai. Saya catat sekali lagi, saya tidak bisnis apapun tentang Alsintan di sini tapi saya objektif di ... Dapil saya karawang. Dia punya lahan 93.000 hektar, dia butuhnya 2-30 ton kalau Karawang. Jujur kita sampaikan apa adanya kebutuhan mereka. Memang yang 10 ton, yang 30 ton tetap yang bisa menjalankan orang yang punya duit. Kita pernah contoh vertical *dryer* dulu yang 800 juta dikasihkan kepada Gapoktan yang duitnya kurang malah hilang dinamanya, enggak bisa dibiayai. Ini masalah kita juga.

Bapak-bapak yang saya hormati.

Kalau memang ini butuh kesepakatan ulang, saya pikir harus ada kesepakatan baru dan catatan-catatan kita adalah banyak juga ini termasuk pisang segala macam kan kita tidak bicarakan dari awal, ada di sini dan artinya butuh pembicaraan. Kalau dibongkar, dibongkar saja enggak ada masalah. Kalau diperbaiki, diperbaiki yang penting tepat sasaran untuk semua. Ini catatan-catatan kami *Insyah Allah* kebijakan Kementan banyak kami pandang baik kok. Urusan secara teknis banyak penyimpangan itu persoalan oknumnya butuh konsolidasi di internal Kementan Saudara Menteri. Mudah-mudahan diberi kemudahan, mudah-mudahan mampu dalam kondisi yang berat kita hari ini pangan kita aman. Mudah-mudahan ke depan Kementan mampu menunaikan amanat undang-undang.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Cukup?

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

supaya kita adalah mandiri Pak *Insya Allah*.

Cukup Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi saya jelaskan masalah yang 30 kalau diadakan oleh kementerian, silakan itu untuk wilayah-wilayah yang tidak ada anggotanya. Seperti yang dikatakan oleh Beliau tadi enggak pernah main apa-apa misalnya di Karawang mau diadakan 30 ton ya silakan. Itu kementerian punya wewenang karena kan kementerian juga punya kajian tetapi bukan di daerah yang ada anggota di Dapilnya, ya Pak Menteri, jelas kan maksud saya kan? Kan enggak boleh kebijakan semua kita intervensi ya.

Lanjut Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Ibu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota dan Pak Menteri bersama jajarannya.

Pertama saya ingin sebenarnya tadi saat interupsi saya itu ada ingin apa membahas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi tapi sudah disampaikan oleh Pak Ketua solusinya. Bila itu adalah program yang terkait dengan *dryer* vertical 30 ton ini itu adalah agendanya kementerian, itu silakan tapi ini memang kalau dialokasikan untuk Dapil untuk masyarakat untuk Gapoktan ini memang nanti kita akan menemukan kesulitan. Para penerima termasuk katakan Gapoktan yang menerima itu dia akan kesulitan biaya operasional. Dia butuh modal, dia harus beli gabah dalam jumlah yang besar. Sementara modal daripada Gapoktan ini atau katakan Poktan itu enggak mampu sebesar itu begitu. Saya pikir nanti ini bila dialokasikan seperti itu akan terjadi *idle*, jadi pengangguran.

Saya berharap nanti ini bisa di ini apa dikonversi ke misalnya diganti ke UPO diganti ke mana gitu kan yang sifatnya itu adalah memang sangat dibutuhkan oleh petani begitu. Ini mungkin ini begitu solusinya atau

dibutuhkan yang kecil-kecil lebih kecil lagi itu karena petani kita ini modalnya rendah. Jadi dengan begitu kita berharap anggaran dari kementerian ini ada multiplier efeknya, ada enstralitasnya ya sehingga kita berharap perancang daripada anggaran ini perancang anggaran di Kementan dan juga dari apa program dan kegiatannya itu betul-betul memperhatikan prinsip dan tujuan yang diinginkan oleh Pak Menteri.

Saya berharap juga di sini misalnya ya anggaran untuk dukungan manajemen itu juga yang jumlahnya adalah sebesar 4,9 triliun itu, itu juga kami menilainya terlalu elit, terlalu elitis ya sehingga kami berharap juga agar misalnya Dirjen atau Balitbangtan yang itu anggarannya kecil banget makanya berharap ada alokasi-alokasi anggaran yang mungkin yang perlu direposisi ulang lagi ke Balitbangtan karena saya memperhatikan bahwa BPTP ini sekarang ini sangat untuk 2022 ini sangat rendah anggarannya, sehingga kalau anggarannya rendah di sini berarti kita bisa memprediksi BPTP ini akan kekurangan pekerjaan begitu loh jadi sayang sekali. Mereka memiliki kemampuan tetapi anggaran kecil itu pasti ada terjadi pengangguran begitu loh. Nah, saya berharap ini pun juga tidak terjadi jadi ini perlu ada disisir ulang lagi.

Kemudian yang terkait dengan hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haerudin. Saya berharap nanti tidak terjadi lagi ya kan, ada ayam yang mati berapa hari atau hari itu tiba kemudian ada yang mati, kemudian termasuk juga ... Nah, ini bagian daripada kepedulian kita terhadap program supaya yang diterima oleh petani ini atau peternak itu betul-betul dia menikmati program pertanian. Ini yang menjadi *concern* kita untuk meningkatkan kualitas daripada produk pertanian, kita peternakan kita. Saya cenderung ingin, saya cenderung itu selalu mengatakan bahwa bagaimana peran kita ini menstandarisasi produk-produk pertanian kita, peternakan kita itu untuk mengakselerasi kebutuhan industri supaya juga bisa diserap oleh industri. Ini persoalannya ya.

Nah, kemudian Pak Menteri terkait juga dengan persoalan pupuk. Ini juga memang hampir meratalah, saya tidak mengulang lagi, saya minta supaya pupuk ini betul-betul diselesaikan dibagi secara adil lah ya. Dibagi secara adil yang penting petani itu ada pupuk pada saat dia tanam, ada pupuk. Intinya di situ saja mau pupuk besar mau banyak mau apa bagi mereka enggak begitu penting. Bagi mereka pada saat ada musim tanam, ada pupuk. Ini yang penting penentunya di situ. Jadi saya minta perhatiannya ya pada kementerian supaya hal-hal semacam ini diperhatikan.

Kemudian ada hal lain lagi yang selalu juga kita sering dengung-dengungkan. Alsintan ini, ini sudah banyak dan masih di masyarakat kita tapi bila dia mengalami kerusakan teknis dan lain sebagai macamnya ini tidak ada bengkelnya begitu. Padahal, pada pertemuan-pertemuan lalu itu sudah disebutkan ada bengkel yang bersifatnya *mobile* tapi saya lihat di sini kok enggak ada begitu loh enggak muncul. Ini saya berharap supaya *mobile* yang apa bengkel yang bersifat *mobile* ini, ini bisa juga dipenuhi supaya keluhan masyarakat petani itu bisa diatasi di lapangan karena sekarang ini petani kita kepada Pak Menteri saya menyampaikan apresiasi ya bahwa Alsintan ini

sebenarnya sudah banyak ya cuma kita ada *problem* teknis di lapangan. Mesin-mesin yang besar seperti *combine harvester*, traktor roda empat dan segala macamnya itu, itu sudah banyak ya. Nah, jadi saya minta supaya ini juga diperhatikan.

Kemudian terakhir Pak Menteri Pak Ketua. Saya senang sekali dengan Pak Menteri ini Pak Ketua, bahwa dia selalu di dalam rapat kita ini dia bersama terus ingin bersama dengan Anggota Komisi IV. Saya tuh apresiasi luar biasa sampai dia juga terjun langsung ke dapil-dapil itu mengundang Anggota tapi juga kami berharap ya kan bila ada terjadi pembagian pupuk ya kan, nah ya kasih tahu juga lah Anggota bahwa Anggota ini juga ditagih juga seperti yang dikatakan oleh Ketua. Ditagih oleh petani, mana nih pupuk, mana nih pupuk begitu kan. Nah, jadi saya berharap bila terjadi ada pembagian pupuk begitu kan, itu juga ya ada semacam walaupun apa sedikit informasi bahwa alokasi pupuk ke petani-petani itu seperti apa begitu sehingga kita bisa juga mendampingi.

Demikian Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Wa'alaikumsalam.

Selanjutnya silakan Pak Endro. Selamat datang kembali di Komisi IV, kayaknya enggak betah jauh-jauh dari Komisi IV.

F-P. GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA.):

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

Pak Ketua yang kami hormati, Wakil Ketua Bu Anggi.

Betul Bu katanya ada yang bilang "setinggi-tinggi bangaunya terbang, akhirnya ke sawah juga". Kita keliling ini akhirnya ke Komisi IV juga. Terima kasih. Kangen saya sama Pak Sudin, kangen saya sama Bu Anggia dan juga Mas Rudi dan juga mitra-mitra kita.

Singkat saja Pak Ketua yang ingin kami sampaikan bahwa kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan juga dari teman Anggota tadi bahwa permasalahan pupuk, permasalahan pupuk ini adalah adanya jenjang kekurangan antara pupuk yang RDKK dengan kesediaan pupuk yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kalau toh ini diputar-putar-putar tetap itu akan menjadi masalah tidak hanya hari ini besok sampai 5-10 tahun lagi itu tidak akan selesai. Oleh karena itu saya akan menjunjung tinggi mendorong apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi secepatnya permasalahan kesenjangan ini akan dilakukan, ini yang pertama.

Yang kedua bahwa dengan gonjang-ganjingnya pupuk ini ada dugaan-dugaan dan memang benar ada penyelewengan dari kios, ada penggunaan laporan yang keliru, dan ada juga pengangkutan dan sebagainya dan sebagainya. Ini dugaan-dugaan dan ada ... tetapi ini pendalaman, kami mohon pendalaman kepada laporan yang disampaikan pada siang hari ini, yaitu dari Pupuk Indonesia. Ringkasan halaman tentang penyelewengan pupuk bersubsidi, ini dari 8 data yang ketangkap, 8 yang gimana, kok hampir semuanya itu Jawa Timur. Jadi hanya satu yang Tangerang nomor 2 yang lainnya itu Jawa Timur dan juga Blitar juga ada ini penangkapan ini sudah. Ini langkah yang baik sebetulnya dengan adanya penemuan-penemuan penyelewengan ini juga sehingga nanti lebih tuntas. Yang perlu diperdalam didalami Pak dalam hal ini penyelesaiannya atau didorong adalah apakah aparat kepolisian di Jawa Timur itu lebih baik dengan daripada yang lain karena yang ditangkap Jawa Timur. Itu juga bisa menyebabkan yang tertangkapnya banyak. Apakah dinas pertanian yang Jawa Timur koordinasi dengan aparatnya itu bagus akhirnya ini. Kalau itu memang benar kenapa enggak kita tindak lanjuti di daerah lain. Yang kedua, apakah kios-kios di Jawa Timur itu brengsek semua, yang ketangkap Jawa Timur. Kalau melihat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh teman-teman tadi di Sumbar, ada Jawa Timur ada, tentunya ini sama Pak kalau kios-kios ini tetapi kejadian penangkapan ini yang menjadi menarik untuk kita pendalaman dan juga apakah yang banyak teriak itu orang-orang Jawa Timur yang demo orang Jawa Timur sehingga ini yang menjadi *concern* untuk penangkapan. Oleh karena itu dari data ini mohon untuk didalami agar supaya langkah ini sudah baik. Kita menemukan titik-titik penyelewengan agar pupuk yang dari pabrik bisa sampai kepada masyarakat.

Saya kira itu Pak Ketua yang perlu kami sampaikan, mudah-mudahan solusi-solusi dari penyelewengan pupuk ini bisa cepat selesai sehingga nantinya masyarakat bisa ter-cover. Saya kira itu, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Bu Ketua. Kiki sedikit saja.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Tadi ada yang tertinggal. Saya barusan saja baca-baca berita di Googling masalah pupuk ini. Kok ada, ada cerita kita mengeksplor pupuk ke Korea Selatan. Saya mohon pencerahan ya karena pupuk dalam negeri saja bermasalah kok sudah hebat sekali berarti kita bisa melakukan *trading*.

Terima kasih Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik nanti, silakan, nanti dijawab sekalian. Pak Ansi Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Selamat siang

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh

Pimpinan yang saya hormati.

Teman-teman Komisi IV, Pak Menteri dan para Irjen Eselon I, Pak Sekjen juga yang saya hormati.

Lepas dari adanya evaluasi dan kritisi, secara pribadi terus terang saya harus memberikan apresiasi buat Kementerian Pertanian karena terus terang mungkin subjektivitas saya Kementerian Pertanian ini banyak memberi "muka"lah kepada kami di Dapil. Ini harus saya sampaikan secara terbuka.

Yang berikut saya menekankan kepada Kementerian Pertanian terutama program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mohon diharapkan tidak dihapus atau dikurangi. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat diharapkan memiliki spesifikasi dan kualitas yang unggul. Bibit yang berkualitas, benih yang berkualitas, ternak yang berkualitas ini harus betul-betul diperhatikan oleh Kementerian Pertanian. Khusus untuk Direktorat Jenderal PKH Pak Nasrullah tahun 2021 bantuan yang masih tertunda dan belum terealisasi mohon segera dipercepat Pak. Perlu ada evaluasi juga Pak mengenai pengadaan ternak ini. Kepada Pak Menteri saya juga mau infokan soal Sapi Sumba Ongole, Pak Nasrullah sudah bereskan dengan Bupati Sumba Timur. Terima kasih.

Yang berikut saya ingin tanyakan soal Food Estate Pak. Terus terang Pak Food Estate tolong lebih hati-hati Pak karena di masa lalu sudah ada temuan BPK dan kalau mau jujur objektif sampai hari ini pun teman-teman masih memberikan catatan kritis terhadap ini Pak, maka karena di daerah kami Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan beberapa wilayah itu ada Food Estate, saya melihat hampir beberapa Direktorat Jenderal ini punya program-program konkret terkait dengan Food Estate ini. Maka ini tolong diperhatikan, diperhatikan lebih detil lagi. Jangan sampai menyusahkan Kementerian Pertanian dan Pak Menteri sendiri karena kami ngomong pasti kami juga punya data punya informasi dari lapangan Pak.

Yang berikut terkait dengan data 63 importir yang belum menuntaskan wajib tanam itu kami ingin mendapatkan penjelasannya. Pak Dirjen Hortikultura kemarin ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah itu ada masukan dari daerah terkait dengan sertifikasi benih, benih bawang. Ini saya mendapat laporan dari salah satu Kabupaten di Timor Tengah Utara mereka sudah mengajukan ini dan sudah empat dari lima tahapan mereka penuhi mulai dari analisis kemurnian benih sudah, form pendaftaran untuk sertifikasi

sudah, survei sudah, uji laboratorium sudah tinggal sidang uji genetik. Nah, tolong ini dibantu Pak sehingga kemudian dari daerah-daerah itu muncul benih-benih yang bagus.

Yang terakhir Pak Menteri, terkait dengan halaman 7 dari pemaparan yang disampaikan kepada kami. Kalau dilihat dari tabel di sini anggaran untuk dukungan manajemen itu tergolong cukup tinggi Pak 4,9 triliun, sementara nilai tambah dan daya saingnya itu 1,6 triliun. Nah, mohon penjelasannya ini bagaimana nih prioritasnya pertimbangannya seperti apa sehingga angkanya seperti ini.

Sekian, terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Terima kasih Kakak Ansi. Selanjutnya Mbak Luluk.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati
Bapak/Ibu Anggota yang berbahagia

Ada beberapa persoalan yang ingin saya dalam dan mohon nanti..

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Mohon maaf Pimpinan, saya lupa sedikit lagi satu kalau boleh Mbak Luluk.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Sedikit saja ini karena ini penting juga. Pak Menteri saya tadi temukan, saya temukan ini di yang ini aspirasi ini Program Pekarangan Pangan Lestari. Di situ disebutkan per Anggota dari jalur aspirasi itu 30 paket senilai tiap Anggota 50 juta. Mohon maaf Pak ini kondisi masing-masing daerah dari Pak dari Aceh sampai Papua ini beda. Saya tanya Pak Suhardi kali lalu itu 60 juta. Beliau dari Sulawesi Barat, daerah kami di timur Indonesia ini 75 juta Pak. Ada daerah mungkin di wilayah barat 50 juta. Jadi ini menurut saya tidak bisa dipukul rata Pak harus dilihat dengan konteksnya. Kalau 50 juta berarti Indonesia Timur pakatnya lebih sedikit Pak. Nah, tolong ini di apa diluruskan lagi Pak.

Terima kasih.

Terima kasih Pimpinan, Mbak Luluk terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan Mbak Luluk dilanjutkan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Iya terima kasih Pimpinan.

Mas Ansi bikin saya kaget dan berdebar. Ya terima kasih.

Pak Menteri yang saya hormati.

Ini masih yang terkait dengan pupuk, saya ini membaca halaman awal ya yang paparan dari, dari siapa ini, dari PT Pupuk yang terkait dengan adanya kerancuan tujuan sebagai persoalan pupuk di Indonesia. Jadi tujuan sasaran tidak sinkron, ini kan persoalan pupuk subsidi. Yang menarik ini justru dipaparkan oleh PT Pupuk ya, pertama nih saya bacain. Kerancuan tujuan peningkatan produktivitas atau perlindungan petani kecil. Nah, ini justru yang saya mau tanya dari Pak Menteri sebenarnya persoalan pupuk subsidi ini untuk membantu meningkatkan produktivitas perlindungan petani atau sekedar asal pemerataan walaupun sedikit begitu. Kalau kemudian tujuannya tidak jelas dan kemudian rancu, maka *outputnya* bisa dipastikan ya rancu sampai sekarang tetapi ini kan justru disajikan oleh pihak PT Pupuk Indonesia.

Saya sambungkan dengan persoalan yang ada di lapangan Pak. Misalnya ada daerah-daerah yang nyata-nyata sebagai lumbung padi katakanlah di Jawa Tengah itu Kabupaten Sragen. Dulu saya pernah dengar bahwa Sragen ini penghasil padi atau beras ke-9 terbesar lah di Indonesia tapi kemudian mereka menerima pupuk subsidi ya tidak lebih kecil tidak lebih besar dari yang lain begitu. Jadi kalau secara rata-rata persentase mungkin ya 30-33 paling banter. Nah, kaitannya dengan dukungan peningkatan produksi dan juga sekaligus komitmen dari pemerintah agar daerah-daerah penyangga lumbung padi seperti ini tetap bisa berjalan dengan baik, apakah tidak dimungkinkan ada semacam kebijakan afirmatif kepada daerah-daerah katakanlah seperti Sragen atau daerah-daerah yang lain yang memang nyata-nyata sebagai penghasil padi yang sangat besar, sehingga alokasi atau pembagian pupuk itu ya prinsipnya adil proporsional. Jadi bukan sama rata atau sekedar sama rasa begitu. Kalau adil proporsional maka pasti menyesuaikan dengan kekuatan produksi yang dihasilkan dan juga kontribusi atau sumbangannya pada skala nasional.

Kemudian yang kedua Pak ini yang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker. Ini kan menarik setelah hasil *judicial review* disahkan oleh MK diputuskan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini inkonstitusional bersyarat artinya ini sebenarnya ada peluang bagi kita apabila kemarin dalam penyusunan Undang-Undang Ciptaker ada pasal-pasal yang terkait, yang terkait dengan pangan atau bahkan perlindungan bagi petani kecil yang kemudian itu dijadikan Omnibus Law dan itu kita lihat sebagai kerugian yang sangat besar bagi upaya-upaya kita untuk mewujudkan kemandirian dan juga

sekaligus perlindungan bagi petani. Nah, apakah kemudian pihak Kementerian Pertanian sudah melakukan kajian pasca hasil MK ini begitu yang ini kemudian dimungkinkan untuk melakukan rekonsolidasi bagi Kementerian Pertanian atau sekaligus kemudian melakukan lobi kepada Baleg sebagai pihak yang akan melakukan *adjustment* ya pasca keputusan MK dan itu yang dilakukan oleh beberapa pihak yang lain Pak sehingga mereka mengusulkan pasal-pasal yang dianggap misalnya merugikan yang itu dicantumkan dalam Ciptaker itu kemudian dimintakan kepada Baleg untuk sekalian untuk ditiadakan. Ini pertanyaan saya.

Nah, yang berikutnya terkait dengan kedelai. Mohon maaf kalau tadi mungkin sudah ada yang pertanyakan. Saya hanya ingin menegaskan kepada pihak kementerian apakah kita mengambil pelajaran yang sangat penting terhadap gonjang-ganjing soal kedelai beberapa waktu yang lalu setelah kita dengar adanya sinyalemen ya akan ada harga kedelai di satu atau dua bulan yang akan datang, mengingat 80% kebutuhan kedelai kita ini dipenuhi oleh impor. Dulu pada waktu ada RDPU dengan para asosiasi atau paguyuban tahu dan kedelai yang itu juga dihadiri oleh pejabat Eselon I dari Kementerian Pertanian kita sudah mempertanyakan apakah ada kewajiban tanam bagi importir kedelai dan ini apakah dimungkinkan ini menjadi kebijakan dari Kementerian Pertanian sehingga urusan importasi ini enggak kayak bablas *sak karepe dewek* begitu Pak. Jadi harusnya ada kewajiban tanam bagi importir kedelai, seperti juga tanam bawang itu kan importir bawang juga ada kewajiban tanam bawang.

Kemudian juga kuota importasi kedelai itu apakah juga dimungkinkan untuk bisa diambil kebijakan. Kenapa kuota impor kedelai ini penting karena memberikan kesempatan agar produksi kedelai nasional itu justru kita tingkatkan dan seterusnya kemudian serap kedelai ini juga bisa didesakkan. Jadi antara kuota dan kemudian peningkatan produksi kedelai dan juga kewajiban menyerap dalam negeri ini paralel begitu loh. Jadi kebijakan hulu hilirnya itu dapat sehingga enggak kemudian setiap saat kita dibuat pontang-panting karena adanya perbedaan dan juga perubahan harga di tingkatan internasional. Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Menteri sampai di mana kesiapan kita untuk menjaga agar kondisi pasokan kedelai kita dan juga sekaligus produktivitas kedelai ini benar-benar bisa ditingkatkan. Dulu kita pernah bilang Pimpinan bahwa mestinya ada semacam *road map* kali ya atau bahasa lainnya apalah terserah. Dalam lima tahun itu selama Bapak jadi Menteri, berapa kira-kira produksi kedelai ini bisa ditingkatkan? Berapa luasan lahan itu bisa ditambah untuk urusannya kedelai dan kemudian kita bisa mengurangi seberapa besar dari ketergantungan impor kedelai?

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih dan terakhir yang terkait dengan kemarin karena hasil kunjungan Komisi IV di Kabupaten Sragen yang terkait dengan kematian 23 petani di lahan sawah sana karena adanya jeratan listrik, ada aspirasi yang disampaikan oleh mereka dukungan dari Kementerian Pertanian dalam pengendalian hama khususnya tikus itu dengan memberikan bantuan burung hantu atau Burha ya pengadaan rumah dan plus burung hantunya begitu. Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya jawab dulu Bu Ketua.

Mbak Luluk, sebenarnya menjelaskan kebijakan impor kedelai itu bukannya di Bapak-bapak ini, juga tidak perlu ada rekomendasi dari Bapak-bapak ini. Tugas Bapak-bapak ini memproduksi sebanyak mungkin agar supaya impor kedelainya berkurang kan begitu. Jadi diputuskan dalam Ratas bukannya kebijakan Bapak-bapak ini, bukan.

Tadi yang terakhir ini masalah tikus ya masa di sana ada namanya Bupati ada Gubernur kalau semua permasalahan sekecil apapun dibawa ke Kementerian bagaimana yang masalah nasional mau tertangani. Ini hanya penyampaian saja ya Mbak Luluk ya.

Ya terima kasih, lanjutkan Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM):

Baik, terima kasih. Mbak Alin, Mbak Alien enggak ada ya. Ibu Teti.

F-P. GOLKAR (TETI ROHATININGSIH, S,Sos.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan segenap Anggota Dewan Komisi IV yang saya hormati.
Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Saya hanya menambahkan dari teman-teman tadi terkait masukan bahwa pengadaan Alsintan memang kalau mereknya Cina itu kalau rusak Pak Menteri susah *sparepart*-nya. Ini usulan dari para penerima dari Gapoktan-gapoktan mereka inginnya merek yang Yanmar ataupun Kubota seperti itu sehingga nanti kalau rusak *sparepart*-nya ada di toko-toko. Ini kebanyakan kemarin saya keliling ke wilayah, Ibu saya enggak bisa pakai ini karena ini mereknya China, *sparepart*-nya susah seperti itu. Jadi ini usulan Pak Menteri.

Yang kedua, karena sekarang tenaga manusia susah untuk mencangkul dan lain-lain ada masukan tolong untuk bantuan-bantuan Alsintan Cultivator agar diperbanyak Pak Menteri karena memang ini di lapangan dibutuhkan apalagi Cilacap terutama adalah swasembada pangan dan Gultiknya juga akan mulai menggeliat.

Yang ketiga karena tadi menyikapi masalah pupuk urea kelangkaan subsidi, bagaimana kalau bantuannya adalah diperbanyak lagi ke POC Pak Menteri karena saya sudah demplot beberapa kali memakai pupuk cair

organik ternyata tidak kalah produksinya kualitasnya dan ini juga ramah lingkungan. Bahan bakunya juga bisa dibuat di masyarakat, kalau nanti pelatihan-pelatihan itu juga bisa untuk sosialisasi itu.

Itu mungkin Pak Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik, Ibu Alien silakan.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Merdeka!

Ikut saja kita Hari Valentine kita ikut yang berdasi merah.

Yang saya hormati tentunya Pak Menteri, Pak Sekjen beserta Eselon I.

Hari ini adalah 14 Februari di mana hari ini merupakan hari peringatan kasih sayang. Ini maksud saya adalah semoga pertemuan kita dengan mitra Menteri Pertanian pada hari ini membawa dampak dan manfaat dan kasih sayang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pimpinan, tentunya ini sejalan yang menjadi dua kali pada pembukaan tahun 2022 ini, saya berharap *automatic adjustment* ini merupakan satu rangkaian untuk perhatian, perhatian yang sangat besar bagi Kementerian Pertanian tentunya kegiatan-kegiatan yang saya sudah lihat dipaparkan oleh Pak Menteri tadi dan juga dokumen yang disampaikan harus berbasis pada kebutuhan kepentingan dari para petani.

Tentunya yang sering terjadi adalah kelangkaan pupuk dan itu memang benar-benar menjadi permasalahan di semua hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia baik dari penyalahgunaannya, penyebarannya dan juga distributor dan sebagainya. Tentunya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh beberapa Anggota tadi tidak perlu saya pulang lagi, kami membutuhkan untuk sosialisasi bagaimana untuk penggunaan pupuk organik Pak karena pupuk organik ini selain juga baik bagi tanaman dan tumbuhan ini juga baik untuk kesehatan kita.

Kemudian tadi sempat disinggung saya benar-benar memperhatikan tentang bagaimana kedelai Pak Menteri. Kemarin ada lagi usut masalah yang saya *share* di grup Komisi IV bahwa akan terjadinya mogok kerja tentang pengusaha atau pengrajin tempe mentah. Kenapa demikian, tahun 2021 saya

masih ingat persis target kita untuk kedelai Pak Dirjen Tanaman Pangan yang saya hormati. Sampai saat ini kita juga harus mendapatkan *report* dan hasil dari tahun 2021 yang kalau enggak salah akan kita dapat itu di bulan 11 kemarin ya kalau enggak salah ya hasilnya ya. Terus tentunya kita tahu persis bahwa impor kedelai ini juga untuk kebutuhan industri tapi juga menjadi kebutuhan konsumsi dalam negeri ini yang harus kita tekankan walaupun tidak adanya RIPH untuk kedelai tapi setidaknya kalau bisa kita memberikan peraturan untuk kedelai ini Pak Menteri karena ini bebas.

Kemudian saya ingin menyampaikan untuk di PSP. Tolong untuk pengadaan apapun itu harus memang sesuai dengan standar dan kriterianya. Jangan sampai kita memberikan bantuan terhadap para petani yang adanya adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ada juga yang mati. Pak Menteri saya mau sampaikan di Dapil saya, alat yang sampai di Dapil saya itu di Kabupaten Pulau Taliabu belum digunakan sama sekali sudah rusak. Alat traktor roda empat ya, bukan roda tujuh belum ada, kalau ada kita mau ini. Tolong ini juga menjadi evaluasi kita bersama. Mungkin karena daerah saya itu, saya orang kampung paling jauh paling terpencil mungkin pas dibawa ke sana jadi rusak atau gimana atau memang alatnya yang sudah bekas atau dicat kembali saya juga enggak tahu pengadaannya bagaimana. Ini menjadi atensi saja Pak Menteri.

Kemudian tentunya saya melihat beberapa kepentingan daripada kebutuhan dari dapil saya tapi bukan hanya dapil saya ini provinsi di hampir Indonesia timur tentang kakao Pak Menteri. Saya pikir kakao dan kelapa ini sangat penting bagi kita di Indonesia Timur menjadi harapan kita. Tolong Pak agar bisa, Pak Sekjen waktu itu masih jadi Dirjen BUN. Saya seringkali mengungkitkan tentang keadaan kelapa ini karena kelapa ini sekarang sudah mulai naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi memang akhirnya turun naik akhirnya. Tolong ini juga menjadi atensi karena kalau seandainya kita hanya melihat di beberapa komoditi andalan yang hanya beroperasi dan menghasilkan barang yang dihasilkan hanya di beberapa provinsi terus apa gunanya kita di provinsi lain. Ini Ketua nursery untuk kelapa sangat penting karena rata-rata kelapa yang ada di Indonesia bagian timur saya enggak tahu di bagian tengah dan barat karena rata-ratanya itu sudah kelapa turun temurun dan tidak adanya peremajaan kelapa. Jadi ini kita butuh sosialisasi juga untuk masalah ini.

Kemudian untuk di Hortikultura. Pak Dirjen, saya terima kasih sekali kemarin sudah datang berkunjung di Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate tapi saya ingin menyampaikan Pak Dirjen, ini kan banyak petani-petani muda yang mau bergerak di bidang hortikultura mendapatkan stimulus atau bantuan Pak Menteri karena ternyata yang banyak sekali aktivitasnya di bidang horti itu termasuk petani-petani milenial. Ini yang menjadi atensi kita bersama. Sayur-sayuran sangat penting apalagi itu kalau untuk bunga di daerah saya belum terlalu, terlalu ini tapi kalau untuk sayur-sayuran sekarang mereka sudah beranjak ke horti dan ini sangat menjadi prospek buat mereka karena di Provinsi Maluku Utara sana banyak sekali perusahaan pertambangan dan mereka mau mengkonsumsi sayur-sayuran yang berjenis hortikultura.

Itu saja Pimpinan yang ingin saya sampaikan bahwa kalau memang ada perubahan kesepakatan lagi untuk di *automatic adjustment* ini, saya berharap bahwa kita lebih mementingkan kepentingan para petani dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik. Terakhir Pak dr. Slamet.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim

Terima kasih Bu Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh

Pimpinan, Anggota Dewan Komisi IV yang saya hormati.
Pak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I yang saya hormati.

Terima kasih.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan Pak Menteri, Pimpinan, yang pertama saya juga menguatkan Pak Menteri terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya di sisi lain bahwa Kementerian Pertanian sebagai *leading sector* terus menambah produksi begitu di saat yang sama Undang-Undang Cipta Kerja memberi ruang bahwa impor tidak wajib memperhatikan kecukupan dari stok dalam negeri. Oleh karena itu mumpung MK memberikan apa keputusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat, saya pikir Komisi IV maupun juga Kementerian Pertanian ini perlu kemudian memikirkan dan memberikan masukan bahwa ini menjadi penting untuk dilakukan apa pasal perubahan pasal-pasal itu, itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga terkait dengan ramainya kedelai Pak Menteri. Itu mohon dikoreksi kalau saya salah, target di 2021 itu kalau tidak salah kan 500 ribu ton begitu ya itu juga saya ingin mendapatkan gambaran realisasinya kayak apa, sementara saya lihat di angka di *slide* ini di 2022 hanya kalau melihat jutanya sih tinggi tapi pakai 0,2 sehingga asumsinya adalah 200.000 ton itu. Nah, ini kok terjadi penurunan ada apa, mungkin bisa dijelaskan sementara memang ini terus masalah ini kan terus berulang tahun begitu. Ya setiap tahun ada apa kenaikan yang kemudian tidak hanya pedagang sebenarnya tetapi konsumen juga merasakan itu karena ini terkait dengan gizi yang paling murah dari rakyat kita hari ini adalah tempe dan tahu begitu Pak Menteri.

Yang berikutnya saya juga ingin apa menjawab atau menanyakan kembali terkait dengan jawaban terkait dengan ID Food ya. Kalau saya

mempertanyakan di pertemuan sebelumnya ID Food akan dikoordinasikan oleh Kementerian supaya tidak terjadi tumpang tindih di mana ID Food ini akan me apa mengakuisisi bahasanya itu petani sebanyak 75.000 dan sekian puluh hektar. Nah, konsep apa ini jadi jawaban kepada kami yang tertulis itu akan dikoordinasikan, tentunya kami ingin mendapatkan gambaran kejelasan bagaimana ini disinergikan dengan target-target pertanian.

Dan yang terakhir ini saya ingin menanyakan ke apa ke yang lembaran yang barusan dibagi tadi terkait dengan itu, terkait dengan ada program yang kita saya sendiri terlupa belum melihat. Ada kelompok usaha bersama ya, kalau tahun kemarin ada dan ini sangat bermanfaat begitu di rakyat kita, tahun ini tidak ada. Tetapi saya juga muncul program kelompok eh apa Pisang ini ya. Germar eh Germas saya tidak menyoal ini walaupun toh memang ini memberikan manfaat hanya itu di kolom itu yang kosong per Anggota itu apakah memang lupa terketikan dibagi 50 atau memang kosong. Kalau kosong mohon berikan penjelasan di wilayah mana yang, yang 700 mohon maaf 700 hektar itu sehingga kami juga bisa memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen kami.

Terima kasih Pak Menteri, Bu Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih kepada seluruh Anggota yang saya hormati. Kita *break* dulu isoma. Kembali ke ruangan ini Pukul 13.30 WIB.

Saya skors.

(RAPAT DISKORS)

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Assalamu'alaikum warahmatullahii wabarakatuh.

Pak Menteri boleh kita mulai?

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Enggak apa-apa biasa sendiri.

Baik, Bapak/Ibu, Pak Menteri dan semua jajarannya.

Semua tanggapan, saran, tanggapan, dan respons dari para Anggota sudah disampaikan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

Izin Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Mohon Pak Menteri..

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

Izin Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

Menyimak pidato Bapak Menteri tadi..

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi IV.
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta Eselon I.

Menyimak pidato Bapak tadi di sini saya menyimak di sini untuk program Badan Ketahanan Pangan, di sini kami melihat ada Pasar Mitra Tani atau Toko Tani Indonesia Center, kami melihat ini program anggarannya lumayan besar 32,6 M dan kedua di sini juga sistem logistik pangan nasional atau fasilitasi distribusi dan *go digital marketing*. Ini perlu dijelaskan Bapak Menteri perkembangan seperti apa ya kan karena di sini juga volumenya lumayan besar dan anggarannya juga memang cukup besar seperti itu.

Nah, untuk selanjutnya Ibu, Pak Menteri, di sini kita melihat program dari Dirjen Perkebunan terus dan lain-lain karena menyimak tadi pidato Bapak-bapak dalam program yang ada, di sini juga kita berbicara benih dan bibit, nah perlu disampaikan juga memang bibit dan benih tersebut memang harus yang berkualitas unggul.

Saya juga berterima kasih banyak dengan program-program Kementerian Pertanian, Kalbar juga mendapat atensi khusus. Nah, pada kesempatan yang lalu di tahun 2021 waktu berkunjung kunker Pak Menteri di Kalbar daerah Mempawah, di sini kan berbicara dengan bengkel, saya sudah dua kali ini menyebutkan bengkel tetapi belum ada, belum ada bengkel yang disalurkan di daerah Mempawah seperti itu. Karena di sini kita melihat juga dalam program PSP, perbengkelan juga tidak banyak. Kami mengharapkan sebagai Anggota apalagi yang mempunyai dapil ya kan, pasti ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pastinya petani seperti itu.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pimpinan.

Oh ya dengan PKH. Nah, di sini ada program dengan aspirasi Komisi IV di sini Dirjen Peternakan dan Hewan. Di sini kan ada kambing, ayam, sapi. Nah, saya juga meminta kepada PKH juga program babi juga terus disalurkan kepada para kelompok. Nah, mudah-mudahan ini bisa diusulkan secepatnya di tahun 2022.

Terima kasih. Demikian.

Selamat siang.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Terima kasih Ibu Maria.

Pak Menteri silakan dijawab direspons semua masukan dari para Anggota. Kita sangat berharap juga lebih cepat ya karena ini Omicron ini jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada Delta. Semoga kita sehat semua. Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV, jajaran Kementan dan Pupuk Indonesia yang saya hormati sekalian.

Yang pertama ingin kami sampaikan terima kasih dan hormat kami semua kepada 14 yang memberikan tanggapan, koreksi, masukan, pertanyaan kepada kami. Ada Pak Abdullah, ada Ibu Dwita Ria, ada Pak Suhardi Duka, dan juga ada Johan, Bu Kiki yang saya hormati, Pak Edward Tannur, Bapak Haerudin, Bapak Hermanto, Bapak Hendro, Bapak Ansi Lema, Bu Luluk, Ibu Teti, Ibu Alien dan Bapak Slamet, terakhir Bu Maria.

Dari tanggapan, masukan dan koreksi, serta kami siap menyesuaikan dan tentu saja jawaban tertulis akan kami sampaikan Pak Dirjen kepada Pimpinan dan segenap Anggota yang kami hormati. Pada dasarnya semua yang kami sampaikan adalah hasil dari evaluasi dan konkretisasi dari RDP-RDP yang sebelumnya ada. Oleh karena itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Abdullah landasan dari penyusunan ini adalah kesepakatan melalui RDP yang telah kita lalui secara bersama. Saya beberapa kali melakukan *check and recheck* kembali kepada jajaran Pak Sekjen dan lain-lain apakah sudah sesuai dengan RDP dan lain-lain. Oleh karena itu kalau masih ada yang belum sempurna mari kita sempurnakan secara bersama. Saya siap untuk melakukan berbagai hal.

Yang kedua, saya menyambut positif semua tanggapan karena ini menjadi koreksi bagi jajaran Kementan dan tentu saja ini menjadi bagian-bagian yang harus menjadi perhatian penuh dari para Eselon I kami dan tentu

saja jajaran dari implementasi, khususnya beberapa catatan-catatan penting untuk kami lakukan ke depan khususnya melakukan langkah-langkah yang melebihi konkret di 2022 ini.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Ada beberapa yang sangat perlu mendapatkan tanggapan dan respon yang saya kira tidak bisa ditunda untuk menjawabnya. Yang pertama masalah pupuk karena ini menjadi memang di mana pun kita turun, masalah pupuk menjadi persoalan. Dan seperti tadi Pimpinan ke Komisi IV sudah sampaikan pupuk bertahun-tahun sudah seperti itu dan terus menerus tentu saja Kementan akan disalahkan dan seperti itu.

Oleh karena itu kita sudah melewati Panja yang ke Komisi IV semua draf dan rekomendasi Panja kita ikuti. Semua draf dan rekomendasi Ombudsman juga kita ikuti, dan sudah melalui Rakor dilakukan dengan Bapak Menko untuk menuntaskan masalah pupuk.

Inti pupuk adalah dari 24 juta ton hasil RDKK, kita hanya mampu menyelesaikan 9 juta jadi memang seperti yang Ketua tadi sampaikan ini masalah persepsi publik yang harus dibuka bahwa memang pupuk kita enggak cukup walaupun memang ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, antara pupuk subsidi dan nonsubsidi *lack*-nya terlalu tinggi, terlalu jauh jadi puluhan ribu bedanya sehingga ini juga membuat ruang-ruang penyelewengan bagi spekulasi dan bagi orang-orang yang memanfaatkan situasi yang ada. Ini juga dikemukakan dalam rakor-rakor yang ada bahwa memang kondisinya seperti itu. Dan yang ketiga semua penyikapan kita terhadap penyimpangan pupuk karena memang pupuknya sudah kurang, tidak boleh dipermainkan lagi dan ini sudah kita lakukan. Saya bahkan berkali-kali melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim dan bahkan kami turun sampai ke Polres ya menangani itu yang terakhir yang kita tangani yang Nganjuk Bapak, jadi tidak sepenuhnya Jawa Timur, hampir semuanya daerah ada hal seperti itu.

Begitu kondisinya yang ada tetapi bahwa pupuk ini harus dilakukan lebih transparan, lebih tidak ribet artinya memang harus lebih kita perbaiki tata kelolanya ini menjadi tugas kami bersama dengan Pupuk Indonesia dan bersama dengan Menteri Keuangan dan memang salah satu bentuk yang akan kita capai besok adalah membuat aplikasi seperti Peduli Lindungi bagi mereka yang sudah ada dalam RDKK, salah satunya seperti itu. Kemudian ada beberapa penyesuaian regulasi yang akan kita lakukan antara lain regulasi itu dari 70 jenis ya komoditi yang ada itu tinggal 9 komoditi dan unsur-unsur dalam subsidi itu hanya 2 urea dan NPK saja yang menjadi orientasi kita. Walaupun demikian tentu ini tetap saja tidak akan cukup karena kebutuhan pupuk dan kesadaran menggunakan pupuk masyarakat sudah cukup tinggi yang harus juga direspons oleh negara. Oleh karena itu memang kita berharap pengenalan terhadap pupuk-pupuk organik yang dibuat sendiri dan UPJA yang tentu saja menjadi bagian-bagian, oh pupuk-pupuk bukan UPJA. Pupuk menjadi bagian-bagian yang harus kita perbuat ke depan. Itu beberapa langkah selain yang sudah kita panja-kan Pak. Jadi semua hasil

Panja DPR itulah yang menjadi rujukan kita dan itu akan.. jadi ada masalah regulasi yang kita perbaiki. Ada masalah tata kelola yang kita perbaiki *but there factor*-nya dari sektornya memang ini yang menjadi catatan Bapak.

Saya berkali-kali dalam rakor bahkan dalam ratas dengan Presiden mengatakan bahwa kalau memang ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, harusnya sepenuhnya di Kementerian Pertanian. Tapi jangan sebentar kekurangan, masalah, semua Kementerian Pertanian sementara uangnya ada di kementerian lain, industrinya ada di kementerian lain, penjabaran ke bawahnya ada di kementerian lain dan seperti itu. Ini memang salah satu hal yang dalam tata kelola sulit untuk kita lakukan karena saya tentu saja akan bisa mengontrol sampai ke bawah kalau mulai dari tanggung jawab dan anggarannya dan seterusnya itu ada di kita seperti itu.

Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa tapi ini lah kondisi dari setiap tahun yang kita hadapi dan tidak akan bisa berhasil kalau terlalu banyak seperti itu. Mestinya karena saya pemilik, saya yang punya program, saya yang punya proyek katakanlah seperti itu tentu vendornya harus taat sama saya lah, tapi bagaimana bisa taat kalau uangnya juga tidak di tempat kita begitu loh. Jadi ini memang menjadi salah satu catatan-catatan yang harus saya buka di tempat ini bahwa ini harus kita perbaiki, dan hal ini sudah saya sampaikan juga kepada Bapak Presiden terhadap hal-hal seperti itu bahwa memang kita butuhkan kurang lebih 70 triliun. Kemampuan negara hanya mempersiapkan kurang lebih 23-24 triliun dan hasilnya adalah harusnya kita menggunakan pupuk 24 juta ton sudah di-press menjadi 16 juta ton tetapi keluarnya 9 juta ton.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih.

Pak Menteri sekedar memberikan masukan. Pertama, tata kelola intinya masalah pupuk ini bukan masalah yang tadi saya bilang ini permasalahan klasik. Mungkin ke depan saya sudah bolak-balik membaca Undang-Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. Saya harap ke depannya kita semua punya *political will* yang sama untuk merevisi undang-undang ini supaya ada sanksi apabila, karena di dalam undang-undang ini tidak ada sanksinya dan tidak ada tata kelola pemberian pupuk di dalam apa hal tersebut. Jadi saya rasa karena salah satu fungsinya kita adalah fungsi legislasi, komitmen dari Komisi IV untuk cermat terhadap undang-undang ini supaya ke depan ada sanksi yang *clear* dan bagaimana tata kelola yang *clear* terkait distribusi pupuk.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan Pak.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya kira memang regulasi menjadi bagian-bagian termasuk harusnya tidak terlalu banyak yang mengatur tata kelola. Kalau satu yang mengatur tata kelola, kan satu yang bertanggungjawab, satu yang terkoreksi ke bawah. Ada pupuk di lini industri, ada pupuk di lini satu di pak gubernur, ada pupuk di lini 3 di para bupati, ada lini 4 di bawah dan distributor dan itu semua tidak di bawah tata kelola yang harusnya dari Kementan yang ada. Jadi ini memang harus diakhiri Ketua dan Pimpinan dan saya kira ini harus kita mesti bunyikan karena besok itu harga pupuk kemungkinan akan naik lebih besar karena Fosfat yang menjadi salah satu masukan yang ada sesuai informasi yang kami dapatkan itu harga di luar naik 3 kali lipat bahkan dari satu negara sebesar Cina tidak mengeluarkan Fosfatnya. Ini menjadi tantangan. Kalau itu terjadi berarti harga pupuk naik besok dan kita harus waspadai kondisi yang ada.

Ini memang menjadi pekerjaan kami sekarang ini seperti apa yang menjadi *warning* dari forum ini. Untuk besok kita akan coba melakukan sosialisasi terbuka terhadap apa yang akan kita lakukan melalui tata kelola-tata kelola yang sudah disepakati baik dari RDP, masukan Ombudsman dari hasil-hasil rakor yang ada. Intinya kita berusaha untuk bisa menggunakan. Tetapi program yang lain yang besok akan segera dikelola sekarang dalam proses melakukan aplikasi Peduli Lindungi dari siapa yang ada di situ, itu yang akan bisa melakukan pencairan-pencairan dari pupuk yang ada. Cuma memang sekali lagi harga pupuk nonsubsidi dan harga pupuk biasa *lack*-nya jauh banget. Oleh karena itu orang menimbun sampai katakanlah seribu dua ribu liter saja akan menjadi sesuatu yang menarik untuk diperdagangkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI:

Siap.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi mengatakan *lack* antara subsidi dan nonsubsidi tinggi sekali. Apa solusi Anda dari Kementerian Pertanian? Saya mau dengar.

MENTERI PERTANIAN RI:

Pak sekali lagi kalau yang berkaitan dengan harga food and food itu tidak di bawah Kementerian Pertanian Bapak. Aku tidak mengadakan kementerian lain tetapi yang namanya harga dan stabilisasi harga dan distribusi perdagangan bukan di Kementerian Pertanian. Ini yang harus bisa diterobos.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ingat lagi itu pada kenaikan harga pupuk, siapa yang memutuskan? Pupuk nonsubsidi.

MENTERI PERTANIAN RI:

Antara kementerian lain, artinya antara..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya ingat Pak Ali Jamil yang mengatakan ada kenaikan.

DIRJEN PSP:

Izin Pak Menteri.

Kalau itu pupuk subsidi Pak Ketua, pupuk subsidi Pak, bukan yang nonsubsidi Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kalau begitu saya balik. Sekarang kalau pupuk subsidi bagaimana solusinya agar tidak terjadi perbedaan terlalu jauh. Kalau pupuk subsidi kan tanggung jawab Kementerian Pertanian untuk ada kenaikan harga dan penurunan harga. Waktu itu saya masih ingat ada kenaikan. Kalau enggak salah per kilo Rp200,- kalau enggak salah. Ayo dijawab.

DIRJEN PSP:

Izin Pak Menteri boleh?

Ya untuk yang di 2021 kemarin Pak itu strategi kita naikkan satu adalah HET Pak untuk menambah volume. Jadi itu untuk yang pupuk nonsubsidi, eh *sorry* pupuk subsidi Pak Ketua, Pak Menteri. Terima kasih Pak. Itu salah satu caranya, kemarin ada..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak, maksud saya kira-kira ada solusi enggak untuk memperkecil antara perbedaan subsidi dan nonsubsidi.

MENTERI PERTANIAN RI:

Izin Ketua.

Tidak dalam kompetensi kita untuk ikut di dalam sana karena penetapannya itu adalah untuk Menteri Perindustrian, BUMN.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang subsidi?

MENTERI PERTANIAN RI:

Kalau subsidi memang..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya subsidi, saya tanya subsidi.

MENTERI PERTANIAN RI:

Kalau subsidi. Nah, sekarang kalau kita naikan lagi ke subsidi Bapak, saya kira dengan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak, kira-kira solusinya. Saya tidak suruh naikan loh, solusinya bagaimana kalau itu kita sedikit perkecil antara subsidi dan nonsubsidi.

DIRJEN PSP:

Izin Pak Menteri. Pak Ketua Izin.

Yang di 2021 case-nya itu Pak itu kita ada tiga strategi Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya 2020 deh bukan 2021 deh.

DIRJEN PSP:

Ya Pak dari 2020 ke 2021 Pak. Jadi itu ada tiga, satu Pak menurunkan HPP. Kita koordinasi dengan produsen itu menurunkan HPP terus kemudian menaikkan HET sedikit itu Pak itu yang disampaikan para Ketua tadi. Terus kemudian ada ..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Untuk menambah volume.

DIRJEN PSP:

Siap. Untuk menaikkan volumenya Pak karena ada uang tersisa di situ setelahnya terefisienkan itu jadi menambah volume Pak Ketua. Itu posisi yang kita lakukan tadinya.

Satunya kemarin itu karena kita perubahan apa namanya komposisi Triple 15 Pak NPK menjadi 15, 10, 12 Pak.

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kira-kira bisa enggak hal itu dilakukan lagi, kira-kira ini yang subsidi.

MENTERI PERTANIAN RI:

Menurut saya dengan coba mengurai hanya dua unsur utama NPK dengan urea ini akan menambah volume. Kemarin itu juga menambah volume sebenarnya dari 7,8 menjadi 9,2 jadi itu, itu menjadi solusi. Tetapi kalau kita mau menaikkan harganya mungkin itu akan perlu pertimbangan yang..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi begini saja dirundingkan dulu di antara Kementerian Pertanian, ya kan. Kalau kira-kira ada naik misalnya Rp50,- Rp100,- dampaknya apa, jalan keluarnya apa, solusinya apa, hasilnya apa misalnya. Ya silakan nanti dikonsultasikan dulu di antara Eselon I dan lain-lain.

MENTERI PERTANIAN RI:

Baik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kenapa kemarin saya ngotot waktu di Panja Pupuk saya minta. Harga Eceran Tertinggi harus ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah pengertiannya ya perdagangan atau keuangan atau PIHC atau Kementerian Pertanian. Saya tidak menyebut pertanian loh, secara global pemerintah. Karena apa, tadi dikatakan kalau harga pupuk bahan fosfatnya naik 300%, bagaimana rakyat mau membeli pupuk nonsubsidi. Subsidi saya enggak dapat, nonsubsidi juga tidak dapat kan begitu kan. Maka pemerintah harus saya kira membuat HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk nonsubsidi, baru jelas ada solusi. Kalau sekarang bulan ini misalnya enam bulan akan triwulan pertama PIHC beli bahan baku naik 100% jadi kenaikan. Beli lagi bahan baku, naik lagi, otomatis pupuk nonsubsidi akan naik lagi. Ini kan suatu kendala yang sangat luar biasa, kasihan petani. Kita memikirkan nasib petani yang tidak dapat pupuk subsidi.

Paham ya Pak Menteri ya?

MENTERI PERTANIAN RI:

Ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya lanjutkan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Baik saya kira masalah pupuk akan kami serius tangani Bapak. Dan mudah-mudahan dengan langkah yang kemarin kita sepakati dengan ...

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

Kalau boleh saran Pimpinan lebih baik diadakan rapat gabungan saja mungkin karena mazhab subsidi ini kan mazhabnya apa Kementerian Keuangan begitu, yang saya lihat kan setiap tahun itu *equal* 9 juta ton, ya kan. Kementerian Pertanian ini harusnya menjadi kesalahannya divalidasi dan diverifikasi saja terus itu, itu saja yang menjadi koreksi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Atas sarannya Ibu Kiki kita hari Kamis akan ada rapat gabungan. Rapat gabungan itu akan dihadiri oleh pertama permasalahan minyak goreng, kedua permasalahan kedelai, ketiga permasalahan pupuk, dan lain-lain. Neraca komoditas yang akan diundang adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM karena berkaitan dengan harga gas. Barusan saya Rapat Konsultasi dengan Pimpinan, Anggota yang ikut IV, VI dan VII. Rencananya hari Kamis Jam 9.30 WIB dipimpin langsung oleh Pimpinan DPR.

Itu saja, lanjutkan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Ketua. Komisi XI enggak Pak Ketua, uangnya di sana.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Komisi XI tadi belum dibicarakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Oke Pak, terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya lanjutkan Pimpinan, para Anggota sekalian yang kami hormati.

Yang kedua yang saya perlu menyampaikan bahwa minyak goreng itu produktivitasnya cukup Pak. Kita bahkan ya dalam tentu data resminya tidak akurat banget tapi itu tidak ada penurunan bahkan mencapai di atas 6 juta, kebutuhan kita 5 juta. Jadi ini juga tentu saja di Kementan tugasnya adalah produktivitas, tugasnya itu. Jadi kalau terjadi hal yang seperti ini tentu saja kami tidak bisa menjawab di dalam forum ini seperti apa harusnya begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya tidak bicara masalah minyak goreng di dalam hal ini. Saya paham, saya sangat paham. Sekarang Pak Sekjen kan mantan Dirjen Perkebunan, produksi CPO tahun 2021 berapa kurang lebih?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

50 juta ton Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

50 juta ton berarti menghasilkan kurang lebih 15 juta ton minyak goreng, ya kan ekuivalen kurang lebih segitu. Kebutuhannya itu kan yang tahu kan perdagangan, kenapa, karena kami itu ingin mengejar ada neraca kebutuhan. Neraca kebutuhan tupoksinya siapa, tupoksinya di Perdagangan. Jadi kami itu mengundang termasuk masalah pupuk, masalah jagung, masalah kedelai, begitu loh. Tadi dalam rapat konsultasi tadi sama Pimpinan, saya sampaikan semuanya. Kalau masalah minyak goreng, Kementerian Pertanian hanya produksi CPO titik. Termasuk juga kedelai ditanyakan, kedelai itu hanya memproduksi, masalah kurang ya itu nanti kita bahas. Bahkan, setahu saya, setahu saya impor kedelai itu tidak membutuhkan rekomendasi dari Kementerian teknis. Jadi mohon maaf ini suka-suka di Gambir sana dan saya tahu kok detilnya si A, si B, si C berapa, saya tahu itu.

Ya lanjutkan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI:

Pimpinan dan segenap Anggota.

Saya kira seperti itu Bapak. Kalau kita lihat dari produktivitas sebenarnya harusnya aman Pak dan kami tidak lagi bisa melanjutkan itu. Intinya bahkan *replanting*, *replanting* sawit kita sekarang ini terus kita jalan. Regulasi-regulasi yang menyulitkan yang ribet dari tadinya 20 16 variabel

sekarang tinggal 3, tinggal 2 Bapak, itu untuk memudahkan semuanya dan pengawasan yang ada. Jadi..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya Pak Menteri.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Pimpinan izin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dua dari Dirjen Perkebunan tapi di 2A, 2B, 2C, 2D bukan hanya 2 tok cuma permasalahannya di situ. Kami kan sudah rapat sama BPDPKS, ya kan karena ini perintah Dewan Pengarah. Selalu kan jawabnya begitu, maka kalau saya ditanya “baiknya bagaimana?” Buat saja Pansus sekalian dengan Komisi XI biar terang benderang. “Oh si A dapat sekian puluh triliun, PT A 37 triliun, PT B 23 triliun, ini 3 triliun” tetapi mereka tidak pernah memikirkan jalan usaha tani bagaimana TBS keluar menuju pabrik. Hancur total jalan, mereka tidak pernah memikirkan. Selalu bilang, kami nurut Dewan Pengarah, kami nurut Dewan Pengarah. Jujur saya sudah rapat konsultasi dengan Komisi XI karena itu di luar kekuasaan saya.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Ketua sedikit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mbak Alien dulu tadi. Ya sebentar Pak Suhardi.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Saya sangat tertarik sekali dengan data yang disediakan oleh BUN soal *replanting* kelapa sawit Pak. Memang kita punya Panja Sawit dan ini sangat-sangat sekali kita butuhkan datanya karena ada korelasinya antara KLHK dengan Pertanian tapi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua tentang yang izin yang diberikan juga untuk perkebunan yang ada yang dibidang rekomendasi atas dewan pengawas dan dewan pembina dan sebagainya itu menjadi permasalahan di lapangan Pak Menteri, sehingga ini menjadi atensi yang luar biasa kalau bisa ini diperhatikan oleh Kementerian Pertanian juga.

Terima kasih Ketua.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Lanjut.

Oleh BPDPKS mengatakan bahwa dia seperti hanya “robot” saja. Seluruh kebijakan itu adalah komite pengawas eh komite pengarah. Kemudian menyalurkan juga berdasarkan dengan rekomendasi. Saya ingin konfirmasi kepada Pak Menteri, kan Pak Menteri kan masuk di dalam sebagai salah seorang Anggota Komite Pengarah ya. Kalau kita melihat alokasi anggaran yang dikeluarkan itu, itu memang tidak sangat tidak adil bagi seperti Pak Ketua katakan. Untuk alokasi untuk kembali ke petani itu hanya kurang lebih 3 triliun, sedangkan ke perusahaan-perusahaan besar itu melampaui dari sampai dengan 40-50 triliun. Saya konfirmasi betul kepada Pak Menteri, apakah memang betul Pak Menteri terlibat dalam alokasi itu atautah memang ini hanya kebijakan di BPDPKS itu? Itu yang ingin saya tanya langsung kepada Pak Menteri.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Lanjut Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN RI:

Saya kira untuk sawit ini kebijakan umum sebagai pengarah iya. Salah satunya memperbaiki regulasi dan lain-lain tapi implementasi tetap seperti apa yang ter ada dalam kebijakan-kebijakan teknis yang ada. Salah satu yang menonjol dalam pembahasan kita adalah sawit milik rakyat, bukan milik perusahaan yang memang bersoal tentang lahan dan rata-rata masuk pada lahan kawasan. Itu yang sementara dalam perjuangan kita jadi seperti itu sehingga kita berharap dengan menyederhanakan segala yang ada dari regulasi itu, ini akan bisa berjalan lebih cepat seperti itu Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Maksud.. Pak Ketua ... lagi. Maksud saya Pak Menteri begini, alokasi anggaran yang diputuskan oleh komite itu 3 triliun kepada kembali ke petani, kemudian 50 triliun kepada pengusaha untuk mengalokasikan 30 atau yang lainnya. Ini kan sangat tidak adil. Nah, kenapa sampai begitu komite memutuskan seperti itu ketidakadilan ini. Ini yang saya ingin anukan kepada Pak Menteri.

ANGGOTA:

Pak Ketua izin. ... Pak Ketua.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Izin Pak Ketua, izin Pak Ketua. Pak Menteri izin.

Pak Suhardi Duka, jadi seperti yang disampaikan Pak Menteri itu yang teknis itu kembali kepada K/L masing-masing. Di untuk sawit rakyat itu dua BPTP dan rekomendasinya, ini yang sudah lalu Pak ya karena yang baru ini

ada, ada dinamika baru ada kemitraan. Itu nanti langsung di bawah BPTP. Nah, yang Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan hanya rekomendasi. Lalu kami sampaikan tadi bahwa alokasi ada sepenuhnya BPTP, memang pada akhirnya diputuskan di Rapat Komrah itu sebagai dasar mereka tapi desainnya sudah barang tentu BPTP sebagai BLU-nya itu yang, jangan Pak Menteri secara detil enggak enggak tahu dan itu koligial di Komrah koligial Bapak tidak satu orang. Jadi koligial, itu satu.

Kemudian yang kedua, Kementerian Pertanian hanya rekomendasi teknis. Tadi disampaikan bahwa 2 kalau itu sudah 2 *goal*. Mohon dibilang dilaporkan saja kepada kami pasti *goal*, soal itu justru itu yang mempersulit yang sedang kami diskusikan kepada BPTP terlalu detail dia merigid lagi untuk, untuk pembayarannya. Padahal, kami sudah tanggung kalau sudah rekomendasi itu layak dibayar bukan ditambah, ditambah lagi.

Nah, soal KTP pastilah Pak ditanya Pak kalau itu pasti ditanya dan itu sudah enggak usah dijadikan syarat. Itu sudah kami lakukan Pak. Jadi dari sudah Pak baku Pak, sudah baku, enggak enggak perlu ditanya lagi. Secara legal formal begitu rekomendasi kami keluarkan harusnya BPTP membayar. Mohon maaf selalu membuang ke Komrah, enggak semua diputus di Komrah, mohon maaf begitu. Nah, ini di berikutnya nanti akan dibahas lagi soal kemitraan itu lain lagi tapi untuk ini itu. Begitu ada dua, syarat kami proses begitu kira-kira.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kemarin waktu Dirut BPDPKS kami tanya, kami enggak punya wewenang apa-apa. Semua Komrah semua, Komrah semua. Saya bilang kalau lu Komrah semua ya lebih baik kita bikin Pansus saja, kita panggil Komranya semua biar lebih ramai lagi biar terang benderang. Ini kan bukan uang sedikit kurang lebih sampai bulan lalu sudah mencapai 110 triliun uang yang dikembalikan untuk B20. Makanya saya selalu koordinasi sekarang dengan Komisi XI, begitu loh Pak. Selalu bilang Komrah, kami saya kan tahu siapa Dirut itu mantan Dirjen Bea Cukai kok.

Lanjutkan.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Saya kira yang lain akan saya jawab tertulis tetapi khusus untuk BPN (Badan Pangan Nasional) semua dalam penanganan di tingkat Menko dan semua yang dimintakan kepada kita, sudah kita sesuaikan dengan apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Ada beberapa kebijakan yang memang kita pertahankan bahwa Badan Ketahanan Pangan masih menjadi operator yang harus tetap bekerja seperti apa adanya karena di sana ada beberapa program strategis termasuk P2L, Toko Tani untuk stabilisasi harga, mendeteksi perjalanan ada provinsi dan daerah yang produsen dan daerah defisit, sehingga dia punya peranan strategis. Dalam Rakor itu disetujui tapi

kita berharap memang dalam perjalanan BPN maka ini tetap bisa dipertahankan. Cuma terakhir ini kemudian kita gamang dengan kemudian anggaran-anggaran yang ada di Badan Ketahanan Pangan itu terbintangi oleh anggaran. Walaupun kita sudah bunyikan dalam kesimpulan kemarin dan kami sudah langsung menghadap Bapak Presiden termasuk dalam ratas untuk dibuka termasuk dengan Pak Menko bahwa kepentingan itu sudah harus bisa dijalankan itu yang kedua.

Yang ketiga, saya kira masalah kedelai. Kedelai itu Pak targetnya memang 400 ribu tadi ada yang tanya tetapi kemudian kan kita *refocusing*. *Refocusing* kita sepakat menurunkan 144.000 hektar saja dan itu kita capai Bapak. Jadi bukan berarti kita ingkar dari apa. Nah, kenapa 2022 turun lagi karena anggaran kita turun dan itu sudah diputuskan di RDP kan. Jadi oleh karena itu saya pikir kita konsisten yang ada di RDP, kemarin itu tidak mungkin kita naikkan dengan anggaran yang turun walaupun dalam implementasikan kami gunakan KUR untuk menyasati kepentingan kedelai itu.

Sekali lagi kedelai memang menjadi pilihan-pilihan yang sulit bagi Kementan karena di satu sisi kalau ini dibandingkan dengan jagung rakyat, lebih memilih jagung dan keuntungan jagung lebih pasti. Kedelai ini pada saat-saat tertentu harga di luar itu kalau yang seperti biasanya.. kenapa impornya lebih besar? Karena harga di luar jauh lebih murah, sementara kita petani kita baru bisa untung kalau dibeli di atas Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo barulah dia akan untung. Kenapa zaman Orde Baru dulu bisa, kedelai kita tanam semua orang Jawa menanam semua kedelai karena disubsidi setara dengan beras. Pada saat itu Pak Harto mensubsidi ... kedelai dengan setara beras. Sekarang ini enggak ada subsidi oleh karena itu memang ini menjadi tantangan-tantangan sendiri bagi kita.

Di sisi lain memang importasi kedelai melalui non lartas tidak ada rekomendasi. Saya berharap sih kalau bisa ini dibunyikan juga karena kalau tanpa lartas seperti ini kita tetap mendapatkan impor kedelai ya mungkin saja dari apa genetik itu.. GMO. Padahal, kita di sini Walhi betul-betul memerangi kita untuk tidak menggunakan itu. Nah, saya yakin ini juga harus menjadi bagian-bagian.. besok..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Wandu tadi saya kurang jelas kenapa tadi tidak pernah menggunakan lartas. Lartas (Larangan Terbatas) untuk GMO tetapi apa kedelai, jagung, gandum yang masuk ke Indonesia tidak melalui rekayasa genetik atau GMO?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Makanya itu Bapak itu yang kami maksud di sini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bibit kita tidak boleh masuk, tapi barangnya boleh masuk. Ini kan seolah-olah kita dijajah oleh pihak luar. “Sudah lo enggak usah produksi lah, lo beli saja sama gue, lebih enak enggak usah susah”. Ini kan, ini menjadi PR kita bersama. Kalau larang kita larang semua sekalian sudah, baru jelas baru kita enggak “banci”. Kira dilarang tetapi mereka masuknya GMO. Ini sudah berapa mungkin 5-6 bulan di benak saya selalu saya berpikir seperti itu.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Izin Pimpinan.

Jika *political will* Pimpinan dan kita semua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tunggu dulu belum disetujui.

Ya silakan.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Maaf. Terima kasih Pimpinan.

Enggak saya hanya menyambut *statement*-nya Pimpinan dan juga Kementan. Saya kira kalau frekuensi kita sama terkait dengan isu ini ya mungkin ini yang memang harus disuarakan oleh Komisi IV dan bisa menjadi keputusan bersama begitu. Persoalan hasil ya itu akan kita perjuangkan tetapi *stand point* kita memang harus jelas.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Pimpinan izin.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak mau ngomong lagi?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Iya dong.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya satu menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Jangan banyak-banyak menitnya Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

kan nambah. Masa' kalau makan nasi padang menambahnya tiga porsi kan enggak mungkin.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Ya empat porsi juga boleh.

Baik, Pak Ketua jadi begini Pak Ketua dan Pak Menteri, kita kembali kepada *mindset* kita tentang kedaulatan pangan. Sejauh ini kan pada periode ini kita orientasinya itu adalah targetnya pajale ini, jadi kedelai ini menjadi prioritas. Di kala kita inginkan ini adalah menjadi prioritas maka seharusnya kita sungguh-sungguh dan serius itu tentu meningkatkan produktivitas kedelai ini. Kita tidak boleh lemah di hadapan para pelaku. Negara harus *exist*, pemerintah harus kuat karena dia memiliki regulasi untuk itu, mempunyai kekuatan eksekusi. Oleh karena itu kita minta supaya Pak Menteri ini harus sungguh-sungguh itu berhadapan dengan para pelaku. Supaya nilai jual kita kalau produktivitas kita itu bisa menguasai pasar dalam negeri karena ini pasar besar Pak Menteri ya. Pasar yang memang dipelihara oleh para pihak luar supaya kita ini lemah dan dia masuk. Ini saya kita Komisi IV ini, ini sebenarnya mendukung Pak Menteri untuk sektor berkaitan dengan kedaulatan pangan ini.

Begitu Pak Ketua.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T): III

Sedikit Pak Ketua. Johan Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya setelah Pak Johan, Pak Ansi Lema.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Ya oke, saya tadi itu hanya menagih janjinya Pak Menteri setahun yang lalu. Janji untuk mengatasi persoalan kedelai ini beri waktu saya untuk dua musim tanam. Itu sekarang Pak Menteri mengeluh sendiri soal kedelai. Nah, itu yang saya bilang coba ceritakan kepada kami apa soalnya ini begitu.

Ini saya tanyakan Pak Ketua, sebentar lagi ya sebentar lagi ini akan naik Pak Ketua. Saya bilang Bulan Maret, Pak Ketua bilang minggu depan. Nah, saya tidak mau ada "jagoan" ketika kasus terjadi, "pasang dada" kita untuk menenangkan rakyat padahal kita tidak memberi tidak memberi jaminan solusi. Jangan sampai nanti ketika langka kedelai, pengusaha tahu

apa namanya mogok segala macam baru kemudian saya akan selesaikan ini, saya akan begini begini, tapi ketika masa longgar seperti ini kita tidak membangun menyepakati sistem atau apa. Dulu yakin sekali Pak Menteri untuk menyatakan bahwa beri saya dua musim tanam untuk menyelesaikan persoalan kedelai dan ini kita belum evaluasi. Jangan sampai kita juga membicarakan hal-hal yang terus-terus seperti ini tanpa kita mendapat kejelasan.

Terima kasih Pak Ketua.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri, saya mau menyambung sedikit yang disampaikan Pak Suhardi soal BPDPKS Pak Menteri. Ya di sini memang bukan salahnya Kementerian Pertanian tetapi kalau saya lihat dari kelembagaannya Pak Menteri di situ itu kan ada representasi konglomerat. Ada tiga konglomerat yang menguasai sekitar 1,5 juta hektar duduk di dewan pengarah. Jadi dari segi kelembagaan BPDPKS ini sangat oligarkis. Kalau sangat oligarkis, dengan demikian kebijakannya itu pasti tidak akan mengarah kepada petani rakyat. Maka target Kementerian Pertanian sejak 2016 sampai sekarang pasti tidak akan tercapai karena 85% subsidi itu larinya ke orang kaya, bukan orang miskin dan menurut saya ini persoalan besar buat republik ini.

Konkret..

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sebentar Kakak Ansi. Memang siapa saja konglomerat yang disebut tadi?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Setahu saya ya 1 Pak TP Rahmat, 2. Sinarmas setahu saya ini mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Yang ketiga kalau tidak salah Martua Sitorus Wilmar Group setahu saya, kalau saya salah bisa dikoreksi tetapi model pengambilan keputusan dengan ada komposisi seperti ini mestinya yang dominan di situ adalah birokrasi teknis yang menentukan sawit rakyat. Nah, kalau kita mau memberes soal ini, ini aspek keadilan yang tadi dikatakan oleh Pak Suhardi, maka menurut saya mestinya konglomerasi ini tidak perlu ada di sini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi ada tulisan dari Suwandi 0,2 juta ton. Saya mau tahu kalau 1 hektar menghasilkan berapa?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Izin Pak Sekjen.

1,5 ton Pak 1 hektar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

1,5 ton. Berarti luasannya berapa? 52 ribu 2022.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Ya 52 ribu hektar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi hasilnya berapa?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Kalikan 1,5 sekitar 70 75an 75 76.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

76.

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Ya sisanya swadaya Bapak, *existing* selama ini ada swadaya sekitar 40-50..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pengertian swadaya saya enggak mengerti gimana?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Petani sudah ada *existing* selama ini menanam kedelai yang sudah mainded.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berarti itu bukan produksi anda toh?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Bukan, yang produksi kita yang 52 nanti dari tanam.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya 52 menghasilkan 75 toh?

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

75.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tadi yang 0,2 berarti..

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Itu total jadi total produksi se-indonesia 200 Bapak

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya paham Bapak, saya paham. Jadi yang 0,2 itu termasuk petani punya, bukan..

DIRJEN TANAMAN PANGAN:

Ya petani punya separuhnya ...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya masa petani dari Jepang yang saya ngomong. Yang saya ngomong kan bahwa produksi 0,2 juta ton itu saya baru tahu ada kata-kata 0,2 juta ton itu adalah produksi dari keseluruhan, yang mana tadi dikatakan 75 ribu ton hasil dari dana yang diperbantukan oleh Kementerian Pertanian selebihnya rakyat. Bisa enggak rakyat ditingkatkan tanpa uang Anda?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Pak Menteri.

Kita *back up* dari KUR Pak supaya lebih banyak lagi petani yang berminat secara swadaya ...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke. Saya menyimpang sedikit. Sekjen anda kan bekas Dirjen Perkebunan, *replanting* dengan dana 30 juta cukup enggak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Tidak cukup Pak, itu hanya menanam dua..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berapaukupnya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Cukupnya 60 juta.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

60 juta sampai..

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Per hektar sampai dengan.. pemeliharaan

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sampai buah pasir atau sampai apa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Sampai P3 itu menjelang tanaman menghasilkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berarti kan tahun keempat kan buah pasir sebutnya yang tidak bisa dijual, ya toh?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Betul.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Selama empat tahun makan apa petaninya? Enggak makan apa petaninya selama empat tahun?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ya tidak ada tapi ada beberapa gagasan. Nomor satu adalah ada *case crop* termasuk ditanami jagung kedelai di sela-sela pertanaman sawit yang baru ditanam.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bibitnya dari?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Bisa dari kita Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ada? Belum ada kan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Belum sampai sekarang belum..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini ceritanya nanti setelah saya tanya, nanti akan dibantu bibit, begitu kan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Betul Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke cukup.

Sekarang yang akan saya tanyakan kepada PIHC. Kita minta jawaban tegas ini supaya dalam kesimpulan rapat tidak ada bias, tidak ada "oh itu bukan urusan saya, itu Kementan". Kementan akan menjawab, "bukan urusan saya, urusan Pupuk". Nah. Lini 1, 2, 3, 4 jadi tanggung jawab siapa? Tolong dijawab PIHC.

PIHC:

PIHC Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya. Ini masalah distribusi loh, kita bicara distribusi lini 1 sampai lini 4.

PIHC:

Ya Pak, terima kasih. PIHC Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya PIHC, PIHC oke. Berarti nanti dalam kesimpulan rapat kita masukan untuk distribusi lini 1-4 adalah tanggung jawab PIHC, tetapi apabila ada penyimpanan pupuk sama petani menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Misalnya saya dapat, saya jual ke Pak Pimpinan sebelah, itu tanggung jawab siapa? Berarti pengawasan ada di Kementerian Pertanian

toh. Coba saya mau tahu ini jawabannya apa ini masalah distribusi masalah sampai di petani, petani menjual alokasinya. PSP mau jawab?

DIRJEN PSP:

Izin Pak Menteri.
Pak Ketua izin, Bapak/Ibu semua.

Itu berarti nanti terkait dengan pengawasan. Kalau pengawasan KP3D Pak itu ada di pusat, provinsi, kabupaten. Jadi itu tadi yang di lapangan itu harapan kita adalah ke teman-teman dari lapangan Pak. Kita kan dari pusat ini sekarang, rentang kendalinya kan di bawah ini Pak. Jadi seperti itu Pak. Maka yang mandatnya kemarin kan KP3 itu, itu ada juga yang terkait dengan Permendagri Pak Ketua itu untuk penganggaran, penganggaran KP3, sehingga itu yang terkait kemarin kita anggaran KP3 untuk baik di provinsi maupun kabupaten itu tidak bisa dilakukan.

Itu Pak Ketua, izin Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang saya tanyakan tadi kan masalah distribusi ini, 1-4 kalau terjadi apa-apa yang akan saya tuntut adalah PIHC karena tugas dia sampai di kios. Dari kios ke petani, sesama petani nih yang kemarin terjadi penjualan, siapa yang mau bertanggungjawab, KP3? Itu kan aduh begini loh, Pak Sekjen saya tanya Pak Sekjen lah. Anda ada DAK enggak untuk pertanian?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ada Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bisa enggak digunakan untuk KP3?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Di sementara ini tidak Pak, tidak untuk KP3.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tinggal diusulkan ke Bappenas, ke Kementerian Keuangan untuk mengefektifkan KP3 kami membutuhkan DAK karena tadi menjawab jawabannya Dirjen PSP tidak boleh karena ada surat edaran Permendagri, betul kan? Betul. Kita gunakan saja dana DAK, itu jelas. Kalau perlu kita masukkan dalam kesimpulan rapat, mengusulkan kepada Bappenas, Dirjen Anggaran atau Kementerian Keuangan untuk DAK untuk fungsinya pengawasan KP3. Jadi Kementerian Keuangan tidak mengeluarkan uang tapi hanya bantu mengawasi karena tadi dananya KP3 enggak ada. Tapi sebetulnya masih bisa enggak, masih kalau empat tahun, lima tahun sekali

collect data. Masa sekian Kementerian Pertanian sudah 40 tahun *database* enggak ada mengenai kebutuhan pupuk. Setiap bulan, setiap tahun *collect*. Perlu enggak dimasukkan dalam kesimpulan Pak Sekjen mengenai tadi usulan saya tadi?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Mungkin kaitannya tambahan anggaran saja Bapak untuk pengawasan itu jangan spesifik DAK.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak masalahnya kalau tambahan anggaran benturan dengan Permendagri menurut PSP.

MENTERI PERTANIAN RI:

Sebenarnya kan ini empat lini Pak. Lini 1 itu koordinasi kementerian, Kementan tentu Menteri Pertanian ada di Lini 1 untuk mengecek berapa kesiapan produksi dan distribusi yang dipersiapkan. Lini 2 ini sudah berada di gubernur, berarti sepenuhnya tanggung jawab gubernur termasuk pengawasan ada di situ. Saya bekas gubernur Bapak. Kemudian Lini 3 ada di bupati, jadi dia di bawah koordinasi bupati. Dulu ini ada Bakorluh (Badan Koordinasi Wilayah) khusus penyuluh karena ini dan lainnya. Kemudian Lini 4 dan seterusnya itu memang sepenuhnya distributor bersama dengan bupati dalam penjabaran. Dulu itu ada KP3 ya, KP3 tapi itu cukup besar anggarannya di sana ada jaksa, di sana ada polisi dilakukan pengawasan dan ini cukup terkendali.

Beberapa tahun terakhir ini tidak jelas ya tidak jelas. Dulu ada anggarannya Bapak mungkin karena kemarin ya kita terlalu banyak *refocusing* sampai 7 triliun itu sangat terasa bahwa ini ada cuma kalau mau ditarik dari DAK, DAK ini sudah jalan karena juknisnya juga sudah keluar dan itu juga sangat sedikit Bapak. DAK hanya sekitar sekian miliar untuk kepentingan yang begitu banyak termasuk daerah.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya paham Pak. Maksud saya kenapa tidak mengusulkan ke DJA ke Bappenas Kementerian Keuangan DAK khusus untuk pengawasan pupuk mengatasi kebocoran. Tadi Bapak kalau mengatakan tadi Lini 1 Bu Menteri, Lini 2.. orang PIHC-nya mau kok Pak yang bertanggungjawab. Kalau terjadi apa-apa ya yang kita tuntutan dia Pak.

MENTERI PERTANIAN RI:

Atau anggarannya dari PIHC saja bagaimana? Dari pupuk saja kan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang mana?

MENTERI PERTANIAN RI:

Anggaran pengawasannya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Di bawah atau 1-4, 1-4 mereka sudah bertanggung jawab.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ke KP3, Komisi Pengawasan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mau enggak PIHC, ada enggak keuangannya seluruh Indonesia untuk mengawasi?

MENTERI PERTANIAN RI:

Pokoknya kita sama-sama saja lah.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

PIHC mau enggak bertanggung jawab untuk KP3 biayanya?

PIHC:

Selama ini bukan di bagian kami Pak ya untuk anggaran ini Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi kalau 1-4 mau tanggung jawab kan tadi kan, sesuai dengan komitmen kan?

PIHC:

Iya itu sesuai dengan itu betul Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu satu solusi tinggal solusinya di petani. Kan ada dana 139 miliar untuk *collect* e-RDCK. Kalau per empat tahun atau per lima tahun berarti ada anggaran lebih. Kenapa anggaran itu tidak digunakan untuk KP3 berarti kan 1-4 PIHC punya tanggung jawab. Enggak ini supaya cepat selesai masalah ini, kalau enggak kita bulet bulet bulet tanggung jawab siapa, tanggung jawab siapa, tanggung jawab siapa itu saja.

Sebetulnya saya ngomong begini Pak Menteri, Pak Menteri yang saya bantu banyak bahwa 1-4 kalau ada masalah Pak Menteri Pertanian tidak bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah PIHC. Tetapi sebaliknya kalau terjadi penyimpangan di bawah di petani sesama mereka saling menjual atau misalnya kelompok tani oknum kelompok tani, oknum Gapoktan bermain itu menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian. Jadi kita bagi tanggung jawabnya. Bagaimana, itu kan ada 139 miliar loh untuk *collect* data e-RDKK.

MENTERI PERTANIAN RI:

Izin Pimpinan.

Menurut saya itu hanya bisa kalau distributor itu di bawah kendali Kementan. Kami tanggung jawab.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Permasalahannya kan peraturannya kan di Perdagangan.

MENTERI PERTANIAN RI:

Maka itu Pak, itu persoalannya karena kan kita enggak punya kompetensi yang cukup untuk..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Lini 4 itu sampai mana Pak? Pak PIHC.

PIHC:

Sampai kios Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sampai kios loh, 1, 2, 3, 4 sampai kios.

MENTERI PERTANIAN RI:

Itu mestinya dia tanggung jawab sampai di bawah karena dia

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya sampai, sampai ini sampai kios.

MENTERI PERTANIAN RI:

Iya yang harus tanggung jawab karena dia harus yang mendistribusi segalanya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak, saya kan katakan tadi 1 sampai dari 1-4 sampai kios.

MENTERI PERTANIAN RI:

Sampai, sampai ke rakyat Bapak. Enggak boleh sampai di ...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak bisa dong karena yang *collect* e-RDKK kan Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN RI:

RDKK itu

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini loh coba bagaimana.

MENTERI PERTANIAN RI:

Soal distribusi bukan soal angka RDKK-nya. RDKK kan enggak ada masalah. Kalau yang mati paling-paling 2-3 orang dan pewarisnya juga yang dapat itu karena yang terdata dalam RDKK ...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bapak bilang 2-3 orang, kemarin dalam RDP 365.000 orang menurut Kepala SDM.

MENTERI PERTANIAN RI:

Iya betul itu. Saya yakin tidak terlalu besar 360.000 orang mati.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Itu data yang diberikan oleh SDM. Boleh tanya teman-teman Komisi IV, 365.000.

MENTERI PERTANIAN RI:

Terlalu besar Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nah, itu yang kami pertanyakan ..

MENTERI PERTANIAN RI:

Dan kalau mati Bapak, anaknya ..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dan itu kan data hasil survei dari Kompas.

MENTERI PERTANIAN RI:

Enggak, enggak saya ini bekas orang lapangan. Tidak ada yang mati tiba-tiba satu kampung, 360 banyak itu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ada data enggak *you* yang 365.000 yang mati.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya sedikit Pimpinan.

Saya kira masalah pupuk ini memang masalah e-RDCK. Jadi kalau terjadi penyimpangan di tingkat bawah itu karena *span of control* kita terlalu jauh. Bagaimana Jakarta mau mengontrol sampai ke tingkat kecamatan sampai ke desa ke dusun. Olehnya itulah memang kita harus berpikir bagaimana pemerintahan ini difungsikan dengan baik. Bagaimana peran dan fungsi bupati, gubernur untuk memberikan pengawasan dan keterlibatan dia terhadap persoalan penerimaan pupuk ini.

Menurut saya sepanjang bupati tidak tahu siapa yang harus diberikan atau menerima pupuk itu, bupati tidak akan bertanggung jawab dan Jakarta pasti *span of control*-nya sampai ke desa akan terputus. Tidak mungkin. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kasus, saya mantan bupati. Selalu mengatakan bahwa tidak melibatkan bupati dalam menentukan siapa penerima pupuk itu, seratus tahun tidak akan terselesaikan. Itu pandangan saya Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang lain ada yang mau memberikan tanggapan atau sambil menunggu?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Izin Pimpinan.

Ya ini terkait sama distribusi pupuk sampai Lini 4. Dulu kita juga pernah juga punya gagasan di Komisi IV untuk dimungkinkan Bumdes itu bisa dilibatkan. Kira-kira ini saya tanya juga ke Kementerian coba dikaji kalau misalnya Bumdes itu dilibatkan apakah ini juga akan relatif..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mbak Luluk itu sudah lewat, enggak usah dibicarakan..

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Ini kaitannya dengan pengawasan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak begini dulu, dengar dulu saya ngomong. Dengan adanya penambahan 1.500 kios, Bumdes, Gapoktan, Koperasi boleh menjadi agen pupuk nonsubsidi. Paham?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Saya paham Pimpinan. Ini kita bicara soal pengawasan tadi. Ini kan kita sedang mendiskusikan kalau misalkan ada macetnya gagasan soal KP3, di sisi lain Bumdes ini 1. Dia punya jangkauan yang ke warga jauh lebih dimungkinkan untuk tahu orang per orang kelompok karena dia juga di bawah SK-nya kepala desa. Ini kan semua diskusi perlu dibuka begitu loh. Siapa tahu kalau kemudian pelibatan Bumdes itu justru sekaligus untuk mengefektifkan pengawasannya di tingkatan akar rumput..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak, yang Mbak Luluk maksudkan Bumdes jadi KP3 begitu?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Bukan sebagai KP3-nya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebagai?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Ya menggerak Bumdes bisa punya fungsi sekaligus ya mungkin bukan KP3 yang yang operasionalnya tetapi dia bisa melakukan pengawasan secara nonformal kepada penyelewengan yang tadi loh petani penerima ..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tidak akan bisa berjalan kalau mereka tidak ada dananya. Maka tadi *reward*-nya adalah memberikan mereka sebagai kios pupuk.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Ketua.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Kalau gitu itu tugas tambahan Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya masuk dalam kesimpulan rapat kok.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Pak Ketua izin.

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau pandangan saya Pak Ketua, P3K tadi diperkuat. Sekarang sebenarnya P3K sudah kuat cuma pembiayaannya tidak ada. Tidak mungkin personil P3K bisa bertindak melakukan tindakan tanpa ada pembiayaan. Yang kita pikirkan bagaimana membiayai P3K ini. Saya kira itu sekedar pemikiran Ketua.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Izin Pimpinan, boleh tanya?

Dulu, maaf apa boleh sudah diizinkan belum itu? Masih tentang P3K. KP3 ya, ya dulu di sini saya masih ingat saja tapi boleh dikoreksi bahwa unsur-unsur KP3 mungkin boleh dijelaskan Pak Menteri karena kita dulu memasukkan masyarakat sebagai salah satu bagian. Nah, itu secara operasional ditempatkannya gimana dan siapa gitu. Jadi Satgasnya bukan hanya KP3 bukan hanya pemerintah.

DIRJEN:

Izin Pak Menteri. Pak Ketua izin Pak.

Baik merespon Bu Luluk itu unsurnya itu tentu tadi sudah disampaikan bahwa ada KP3 di pusat di provinsi dan kabupaten jadi unsurnya kita tentu Pak Bupati Gubernur dan tentu para dinas di sana terus ada PPNS, LSM dan juga Polri. Jadi itu ada bagian-bagian yang sudah kita tuangkan di situ. Jadi terkait dengan pengawasan tadi di jika petani menjual pupuk yang sudah diambil sebagai pupuk subsidi harusnya ada KP3 yang di kabupaten Pak. Iyalah jadi artinya itu kan rantai ke bawah Pak yang harus berjalan seharusnya. Jadi di pengecer itu data kan sudah ada di pengecer. Terus dia jual ke petani, kalau petani yang menjual ya artinya apa ini sekarang ketahuan petaninya bersoal seperti itu dia jual lagi. Jadi itulah saya pikir Pak Ketua yang mungkin kami sampaikan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak, maksud tadi saya pikir itu apa maksudnya? Saya kurang paham.

DIRJEN:

Artinya pengawasan itu Pak di KP3 itu, di KP3, KP3 yang di kabupaten berarti yang tadi kalau itu kasusnya itu ada di petani. Itu kan berarti dari pengecernya petani Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kalau dananya enggak ada?

DIRJEN:

Ya itu tadi kalau itu berarti kan ...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang tadi kan usulan saya bisa enggak ke Sekjen tadi. Buat surat untuk 2023 minta DAK khusus untuk fungsinya pengawasan pupuk subsidi untuk 2023. Kalau sekarang sudah tidak mungkin, sudah berjalan jadi tidak membebaskan APBN miliknya Kementerian Pertanian. Saya ini membantu Kementerian Pertanian loh, gitu loh. Kalau perlu nanti setuju kita masukkan dalam usulan untuk tahun 2023 Komisi IV meminta kepada pemerintah membantu DAK yang fungsinya hanya untuk pengawasan pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan. Saya yakin penyimpangannya itu akan lebih besar daripada DAK yang diturunkan kan begitu. Betul enggak Pak Menteri? Bukan uangnya Pak Menteri bukannya 2022. Kalau 2022 tidak mungkin.

MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ada lagi? Kalau sudah cukup dibuat kesimpulan. Tadi kalau perlu dimasukkan yang kata-kata saya tadi Lini 1 sampai Lini 4 adalah menjadi tanggung jawab PIHC dan Komisi IV mengusulkan, begitu loh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sudah? Tolong ditampilkan.

Ada Bang Muslim ya?

Baik, Bapak/Ibu, Bapak Menteri.

Sudah ya, kita baca kesimpulan rapat kita kali ini.
Poin pertama,

1. *Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian terkait pembukaan blokir di Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp147.300.000.000 yang di antaranya dialokasikan untuk kegiatan Pekarangan Pangan Lestari dan Bimbingan Teknis Ketahanan Pangan.*

Para Anggota?
Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

Poin 2.

2. *Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian atas pencadangan anggaran automatic adjustment Belanja Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebesar Rp680.488.248.000 dari Pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp14.451.749.428.000 dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:*
 - a. *Sekretariat Jenderal sebesar Rp175.115.670.000;*
 - b. *Inspektorat Jenderal sebesar Rp97.677.527.000;*
 - c. *Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp45.588.572.000;*
 - d. *Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp18.233.560.000;*
 - e. *Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp26.733.807.000;*
 - f. *Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp41.099.262.000;*
 - g. *Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang sebesar Rp59.489.136.000;*
 - h. *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebesar Rp8.597.879.000;*
 - i. *Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp33.480.603.000;*
 - j. *Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp262.300.136.000; dan*
 - k. *Badan Karantina Pertanian sebesar Rp9.809.623.000.*

Para Anggota?
Pak Menteri? Silakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin.

Yang Inspektorat Jenderal izin dikoreksi. Nol itu yang Inspektorat Jenderal, tidak ada, iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Oh enggak ada ya, enggak ada ininya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Nol.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya tidak ada tidak kena *automatic adjustment*.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Perkebunan izin, naik, ya itu 773 ya, 773 iya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ada koreksi lagi Pak Sekjen? Sudah?

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Sudah cukup.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Anggota?
Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

Poin 3.

3. *Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan restrukturisasi proporsi anggaran untuk lima program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani antara lain: program vertical dryer 30 ton dan bengkel alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani atau peternak di daerah, antara lain program vertical dryer, bengkel alat mesin pertanian, pupuk organik, pengembangan kawasan pertanian, pengembangan tanaman kelapa, dan pengembangan sayur dan buah.*

Itu termasuk *combine* juga di dalamnya ya? Ditambahi ya.

Para Anggota, biar dibaca sama Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Mohon izin Pimpinan mengkonfirmasi. Itu maknanya yang *vertical dryer* 30 ton tidak ada, diganti dengan yang lain, maknanya begitu?

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya kira begini Pimpinan, secara sesuai dengan kepentingan dapil, kalau dapilnya tidak cocok 30 ton bisa diganti dengan *combine*, tapi kalau dapilnya cocok ya tetap tentu ada.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya tadi sudah, tadi dalam beberapa teman-teman mengusulkan yang 30 terlalu besar itu untuk pengusaha menengah. Maka kita tadi sudah bersepakat biarlah yang 10 ton saja biar dipakai untuk Gapoktan. Kalau masalah nanti misalnya oh Pak Suhardi Duka mau ada tambahan *combine* kan bisa ditukar dengan sesama teman.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya artinya begini Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Misalnya begini, oh saya enggak mau ... saya kasih Pak Suhardi atau *combine*-nya ... tinggal kita bicara saja semua.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Artinya Ketua 30 ton ini hapus?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Hapus.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Berarti anggarannya 2,2 diganti dengan ..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dryer tapi tambah unit.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya toh? Begitu kan Pak Suwandi?

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ya harus jelas ini.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak sudah pasti jelas lah, kalau eenggak masa dia mau bohongi kita walaupun kadang-kadang bohong juga Wandu.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ketua. Pak Ketua interupsi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):

Ya sedikit ini buat kepastian saja nih karena saya ini sudah bersurat kepada Dirjen Tanaman Pangan. Saya butuh *combine harvester* apakah itu bisa atau tidak? Konkret nih Pak Ketua. Oh ya terima kasih Pak Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Dibaca itu sudah ada Kakak. Sebelum Kakak ngomong saya sudah ngomong duluan tadi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Ansi Lema tidak melihat layar tapi melihat sebelah kiri yang bagus.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ini ya sesuai dengan kebutuhan petani ini maksudkan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing kan begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya. Setuju?

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Poin 4.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kenapa tadi dihapus lagi itu? Apa itu coba.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Eenggak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh ya, ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Sudah? Tidak mengurangi merubah makna kan?

Baik. Poin 4. Komisi IV, Komisinya kok begitu tulisannya.

4. *Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan data yang akurat, antara lain: Kegiatan inseminasi buatan pada sapi dalam mendukung program panen 100.000 pedet sebagai upaya untuk swasembada daging beserta tindak lanjut kegiatan tersebut di sentra-sentra produksi peternakan sapi dan data importir yang belum menyelesaikan wajib tanam.*

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini apaan ini enggak nyambung.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Iya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wey..

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Enggak nyambung, enggak nyambung.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kok masalah ternak kok langsung minta data wajib.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Satu saja.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Belum menyelesaikan wajib tanaman apa? Tanam pohon toge?

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ini mungkin di kalau mau dimasukkan di poin yang berbeda mungkin ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Poin yang berbeda ini kan kagak nyambung. Poin yang bernomor yang berbeda.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Nomor yang berbeda.

Sekarang kita ke poin 4 dulu. Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan. Komisi IV saya ulangi ya.

4. *Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan data yang akurat tentang kegiatan inseminasi buatan pada sapi dalam mendukung program panen 100.000 pedet sebagai upaya untuk swasembada daging beserta tindak lanjut kegiatan tersebut di sentra-sentra produksi peternakan sapi.*

Para Anggota?
Pak Menteri?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Dirjen jawab saja enggak apa-apa kok atau takut salah jawab, makanya lapor Pak Menteri dulu.

DIRJEN PKH:

Izin Pak Menteri, Pak Ketua, Pimpinan dan Anggota.

Untuk kegiatan inseminasi buatan dalam program peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi dan kerbau, itu berbeda dengan khusus untuk yang kegiatan rencana yang panen yang diluncurkan oleh Pak Menteri di Lampung untuk Sapi Belgian Blue 100.000. Ini punya tahapan tersendiri. Namun demikian, dalam penyediaan sperma di inseminasi buatan juga ada disiapkan sperma Belgian Blue yang siap didistribusi jika daerah itu menurutnya cocok untuk dikembangkan Belgian Blue di lokasi tersebut.

Demikian penjelasan Pak Ketua, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi narasinya apa ini, dia sudah ngomong langsung diam.

DIRJEN PKH:

Ya.

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian untuk menyampaikan data kegiatan inseminasi buatan pada sentra-sentra produksi ternak sapi.

Saya kira cukup begitu Pak Menteri. Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Banyaknya berapa enggak tahu, enggak dicantumkan? Apa acuannya kami dalam memberikan anggaran.

DIRJEN PKH:

Per daerah ada Pak. Lokasi berapa semen yang disiapkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi *you* belum hitung sampai sekarang belum hitung?

DIRJEN PKH:

Sudah Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya kan kenapa enggak dicantumin. Kami kan mau tahu dong, kami mengeluarkan uang menyetujui uang sekian, apa yang dihasilkan?

DIRJEN PKH:

Izin Pak Ketua.

Kalau memang ini diminta lebih detailnya, kami akan siapkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi kan ini harus kami ambil kesimpulan atau enggak ada kesimpulan hari ini.

DIRJEN PKH:

Izin Pak Ketua. Maksudnya data tentang ini secara detail akan disiapkan sebagai kesimpulan di rapat ini. Jadi kami akan menyiapkan data-data ini secara detail khususnya di sentra-sentra produksi berapa target *acceptor*, berapa semen beku yang disiapkan dan berapa kelahiran itu kami sudah punya data dan siap untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota jika menjadi keputusan dalam rapat ini.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Atau usul Ketua, jadi usul apa tambahan narasi akan didata secara lengkap akan disampaikan kapan begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini enggak bisa karena lagi itu kan kita sudah bicara kegiatan inseminasi buatan IB pada sapi dalam mendukung program panen 100.000 pedet sebagai upaya untuk swasembada daging beserta tindak lanjut, tindaklanjutnya bagaimana setelah 100.000 itu. Kalau enggak ada angkanya bagaimana kami mau menyetujui anggarannya. Coba bagaimana? Kalau perlu kami tambahkan kata-katanya di bawahnya, coba itu.

Tindak lanjutnya nyambung itu, spasi.

DIRJEN PKH:

Izin. Izin Pak Menteri, Pak Ketua.

Jadi mungkin redaksinya, izin Pak Ketua.

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data IB pada sentra-sentra ternak sapi termasuk dalamnya kegiatan program panen rencana panen pedet 100.000 untuk Belgian Blue.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bukan yang di Lampung itu sudah kita *launching* dulu sama Pak Menteri?

DIRJEN PKH:

Ya Pak dimulai dari situ Pak Ketua. Jadi kami akan nanti memberikan data laporan per hari ini begitu Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Coba ulangi lagi tadi kata-katanya.

DIRJEN PKH:

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data kegiatan inseminasi buatan pada sentra-sentra ternak sapi serta tindak lanjut program, rencana program panen 100.000 pedet sapi Belgian Blue.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Baik. Ini terakhir ya, ter-*update* maksudnya.

Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data kegiatan inseminasi buatan pada sentra-sentra

ternak sapi, serta tindak lanjut kegiatan rencana program panen 100.000 pedet sapi Belgian Blue.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya kurang setuju kalau ada kata-kata “rencana” karena itu kan programnya sudah diluncurkan. Masalah nanti tercapai enggak tercapai kan, kan ada sebabnya. Ya toh, ini tidak berjalan karena mungkin peternaknya kurang canggih, kurang penyuluhan, kurang apa kurang apa tapi kalau bawa-bawa “rencana” kan sudah kita *launching* dulu. Pak Menteri sampai nyanyi-nyanyi di atas panggung. Bagaimana Dirjen PKH-nya, ya setuju ya?

DIRJEN PKH:

Izin Pak Ketua.

Mungkin programnya diganti jadi kegiatan panen karena ini kan programnya program namanya programnya itu peningkatan populasi dan produktivitas. Keegiatannya salah satunya adalah 100.000 panen pedet sapi Belgian Blue.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begini cukup?

DIRJEN PKH:

Cukup Pak.

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Komisi IV. Poin 5.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan data 63 importir yang belum menyelesaikan wajib tanam bawang putih.

Anggota?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dari mana data 63 importir ini?

DIRJEN KEMANTAN:

Izin. Mungkin tahunnya Pak, ini mungkin tahun 2020.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak tunggu dulu. Saya eenggak izinin bicara anda.

Tadi Mbak Luluk mengusulkan 63, data dari mana 63 ini?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Izin Pimpinan.

Pada waktu rapat terakhir kita sudah menanyakan itu tahun 2021 tapi di Bulan Mei ya dan kita belum ada penjelasan sampai sekarang. Makanya terakhir kita minta maksudnya begitu. Nah inilah kita mau menagih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eenggak yang saya tanyakan 63 data importir ini siapa?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si.,M.P.A.):

Iya ini di *release* oleh kementerian sendiri Pak tahun 2021 bulan Mei kita.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Betul Kementerian ada bicara 63?

DIRJEN KEMANTAN:

Belum Pak. Mungkin ini yang tahun 2020, bukan tahun 2021 Pak. Jadi ini yang tahun 2020 Pak, bukan tahun 2021. Kalau tahun 2021 wajib tanamnya kan dikasih waktu satu tahun Pak. Jadi ini satu tahunnya saja belum selesai untuk tahun dua ribu.. sampai ke tahun 2022 nya. Jadi kalau.. jadi artinya kalau.. Mohon izin Pak Ketua. Kalau di sini perlu disebutkan tahunnya, kalau 63 tahun berapa berarti ini tahun 2020.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya dan belum kan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Pak Ketua boleh izin Pak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Boleh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Narasinya diubah. Kalau memang esensinya Komisi IV adalah data importir yang belum tanam, hemat saya enggak usah disebut angkanya Pak nanti ditulis per per berapa begitu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya, kalau toh ada 100, yang sekian dihilangkan. Jadi saya bingung maka yang tadi jadi pertanyaan saya adalah 63 itu dari mana angkanya. Menyampaikan data-data importir yang belum menyelesaikan, data-data importir yang belum menyelesaikan wajib tanam RIPH bawang putih pada tahun..

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

2020 Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sudah cukup? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Poin 6.

6. *Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia Persero bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini 1 hingga kios yang akan dibahas secara mendetail pada rapat selanjutnya.*

Para Anggota?
Pak...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

PIHC?

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Ya Pak Bakir setuju? Pak Menteri?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Setuju, iya dong.

(RAPAT: SETUJU)

Tinggal nanti yang di bawahnya tanggung jawab kementerian. Ini yang terakhir.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Poin 7.

7. Komisi IV DPR RI merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kepada Bappenas dan Kemenkeu untuk menambah alokasi DAK yang akan digunakan untuk..

“Untuk”nya dipanjangin ya jangan disingkat.

peningkatan efektivitas kinerja KP3.

Para Anggota?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

DAK Tahun 2023.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Anggota?

Para Anggota?

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya sedikit.

WAKIL KETUA KOMISI IV (ANGGIA ERMA RINI, MKM.):

Silakan Pak Suhardi Duka.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya ini ya mantan pengelola anggaran juga. Dana alokasi khusus itu memang kajiannya untuk pengembangan daerah dan kepentingan pusat. Untuk hal-hal yang bersifat pengawasan saya kira selama ini tidak pernah kita alokasikan atau menerima dana DAK di tingkat daerah. Jadi saya minta pertimbangan mungkin lebih bagus tetap Kementerian Pertanian mengusulkan kepada Kemenko melalui dana tugas pembantuan karena itu memang dananya Menteri Pertanian kalau melalui lewat tugas pembantuan. Kalau DAK itu masuk di APBD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Wilayah kontrolnya ada di penuh di provinsi dan di tingkat kabupaten, tetapi kalau dana tugas pembantuan itu dikontrol langsung pada Kementerian Pertanian.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Masalahnya..

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Itu lebih mudah Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eggak kalau tugas pembantuan tadi ada kendala surat edaran tadi Kemendagri, betul enggak Pak PSP?

DIRJEN KEMANTAN:

Izin Pak Menteri.

Pak Ketua ya jadi karena sistem APBD itu kan begitu Pak. Jadi Permendagri 27 2021 itu ya bunyinya terkait dengan pengajuan APBD. Jadi kita sudah komunikasi dengan Bappenas, itu Bappenas tidak mau mengizinkan kalau kita masukan anggaran APBD, jadi Permendagri pun terkunci dengan itu. Izin Pak Menteri ini mungkin kalau anggaran pengawasannya di mana diletakkan mungkin itu saja mungkin harus ditarik Pak. Ya karena terkunci dengan Permendagri tadi. Ya kalau mungkin ada ..

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

APBD itu semua tersistem tidak bisa kita gampang bikin akun apa apa namanya ya nomenklatur, semua tersistem di Kemendagri. Dengan demikian kalau DAK itu akan sangat sulit Pak Ketua. Hanya saja kalau saya ingin tanya Pak Jamil lah kan kalau tugas pembantuan memungkinkan atau tidak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Coba kita ambil solusi terbaik. Coba Pak Sekjen, apa dana perbantuan bantuan khusus untuk pengawasan. Berarti kan nanti domainnya tetap di Kementerian Pertanian itu saja. Coba.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Izin Pak Menteri.

Komisi IV DPR RI merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi dana tugas pembantuan..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kebalik heh.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

“Dana tugas pembantuan untuk pengawasan”, itu yang terakhir itu. Eggak jangan dihapus KP3-nya jangan dihapus jadi “dana alokasi khusus”.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Kasdi lihat sini jangan lihat sana.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Mohon izin saya membacanya pelan jadinya. Mohon maaf kami ulangi.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Lihatannya sebelah Ansi Lema melulu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Komisi IV DPR RI merekomendasikan Kementerian Pertanian untuk mengusulkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menambah alokasi dana Tugas Pembantuan untuk pengawasan, untuk pengawasan pupuk dan pestisida tahun 2023..

Itu sebenarnya titik juga sudah selesai Pak itu. Kalau KP3-nya.. kalau KP3-nya dimasukkan ya “pengawasan yang akan di.. pengawasan yang akan digunakan untuk..” jadi “pupuk pestisida” dihapus lagi. Izin, izin, ya itu begini Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anggota?
Pemerintah?

(RAPAT:SETUJU)

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Pimpinan izin.

Bisa tambah satu kesimpulan Pak?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sebutkan nama.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Saya Alien Mus, Anggota 347 Fraksi Partai Golkar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya lanjut.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Sebelum ditulis tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Menteri soal bagaimana permasalahan pengalokasian pupuk yang terjadi dan selalu Kementerian Pertanian menjadi disalahkan. Ini pupuk subsidi ya Pak Menteri. Saya meminta Pak Ketua karena kita harus mencari satu solusi seperti yang Ketua sampaikan tadi solusinya apa sih untuk pupuk subsidi ini dan, dan jangan berulang tahun permasalahannya. Apakah perlu kita memberikan satu permintaan atau mungkin rekomendasi atau mungkin persyaratan bahwa pupuk subsidi itu kalau memang untuk memperjelaskan agar tidak terjadi lagi masalah ke depannya, apakah harus di salah satu kementerian yang jelasnya adalah untuk mempertanggungjawabkan alurnya, penganggarannya dan untuk penerimanya, misalkan ini saya mempertanyakan. Kemudian kalau memang seperti itu apakah akan berhasil untuk masalah penyelesaian masalah pupuk ini.

Itu Ketua saya ingin memperjelas saja karena saya berharap kami Komisi IV ini dan juga mitra kami yang ada di Kementerian Pertanian dan juga di sini ada PIHC yang ada di BUMN bisa mencari solusi sehingga masyarakat tidak lagi menjadi bimbang dan ragu tentang permasalahan pupuk yang subsidi ini.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi ini Mbak Alien ini kan sudah mulai kita pisahkan ini. Lini 1 sampai kios tanggung jawabnya ini, ya toh. Yang nanti di petani tanggung jawabnya ini. Itu kan solusi ya pelan-pelan lah. Nanti kami akan ada rapat gabungan pendalaman secara detail termasuk kenaikan bahan baku pupuk antara lain gas. Setuju?

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Izin Pimpinan.

Terakhir ini tentang kedelai tadi Pimpinan, boleh bicara ya saya?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya.

F-P. GOLKAR (ALIEN MUS, S. H.):

Ya saya usul untuk Komisi IV diperkenankan tadi saya sebenarnya menggarisbawahi semangatnya Ketua, perlu adanya aturan lah yang terkait dengan importasi walaupun ini bukan di Kementan tetapi disuarakan itu penting. Jadi pelarangan terbatas atau kuota importasi itu perlu dimohonkan kepada pemerintah untuk diadakan. Untuk apa? Ya agar mendorong produksi dalam negeri itu ada. Yang kedua ya insentif harga karena dulu era Orde

Baru juga pernah dilakukan. Nah, kalau ini tidak pernah menjadi pemikiran di Komisi IV yang memang kita akan dipertanyakan juga gitu fungsi kita.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begini loh Mbak makanya kalau setiap hari usahakan datang masuk jelas. Kami pernah memanggil pengusaha, mencari solusi apakah Anda bisa bantu saya untuk memberikan bibit. Permasalahannya bibitnya itu enggak gampang, negara produsen itu tidak belum tentu mau mengimpor bibit. Antara bibit dengan yang diimpor beda, itu loh dan itu akan nanti di.. saya ulangi lagi. Semua permasalahan minyak goreng, kedelai, jagung, pupuk akan dibahas secara bersama tiga Komisi, empat Kementerian. Jelas?

Dari dialog dan masukan hari ini sebelum acara ini kami tutup, kesimpulan rapat sudah kita setuju, selanjutnya sebelum kita mengakhiri rapat kerja hari ini kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan kata penutup.

Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV

Izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih bahwa perjalanan anggaran kita di 2022 *Insyah Allah* sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan-kesepakatan yang ada. Kami tahu persis tantangan yang kami hadapi di 2022 ini pasti lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Kami menghadapi *climate change* dan ekstrem cuaca yang anomali akan terjadi intrusi air laut masuk pada pinggir-pinggir pantai akan mempengaruhi produktivitas kita dan di sisi lain ya tentu saja kita berharap anggaran juga terus menjadi masalah di kita karena keterbatasan-keterbatasan negara.

Yang kedua karena Covid dan lain-lain sebagainya terjadi gejolak harga di luar harga global yang naik Bapak. Harga kedelai akan segera naik di luar negeri, harga jagung juga seperti itu, kami lagi berpikir keras di Kementan sebenarnya untuk bisa memanfaatkan untuk kepentingan kemandirian kita sendiri. Harga sapi juga akan naik dan ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri di saat-saat kita akan panen raya nanti Maret - April sekitar 17 juta ton gabah yang ada. Oleh karena itu ini tidak kecil tantangan. Kami berharap bimbingan dan pendampingan, kebersamaan dengan Komisi IV yang selama ini terjaga dengan baik, kami berharap betul-betul kita bisa tingkatkan komunikasi kita karena tantangan ini pasti saja tidak kecil. Besok kita akan Ramadhan bulan Puasa kemudian Idul Fitri..

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ramadhannya bulan depan Pak Menteri bukan besok.

MENTERI PERTANIAN RI:

Ya. Besok Jawa ini Bapak, panjang ... dan harga-harga akan naik Bapak. Izin kami berkonsentrasi untuk mempersiapkan itu. Kemarin kami berkoordinasi dengan Menteri Australia dan lain-lain bagaimana sulitnya mendapatkan importasi daging. Jadi dulu kalau kita mau impor banyak, sekarang kita mau impor, negara lain belum tentu mempersiapkan itu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Kami siap dan kami yakin bisa melampau seperti yang dua tahun, sepanjang ada Komisi IV, Ketua Komisi IV apalagi ikut memberikan *advice* dan..

Saya ke situ Pak Ketua tapi dia balik ke sana terus.

Ridho Allah bersama kita, terima kasih atas segala kebersamaan. Kalau ada yang kurang kami minta maaf, kami siap mengoreksi dan memperbaiki.

Sekian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja kita pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV kami mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam memimpin rapat kerja hari ini, kami mohon maaf. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahillobbil'alamin*, rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002